

K.H. ABDURRAHMAN WAHID

(Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politiknya di Indonesia)



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Humaniora Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam
pada Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
NURHIDAYAH
NIM. 40200109034
ALAUDDIN
MAKASSAR

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013

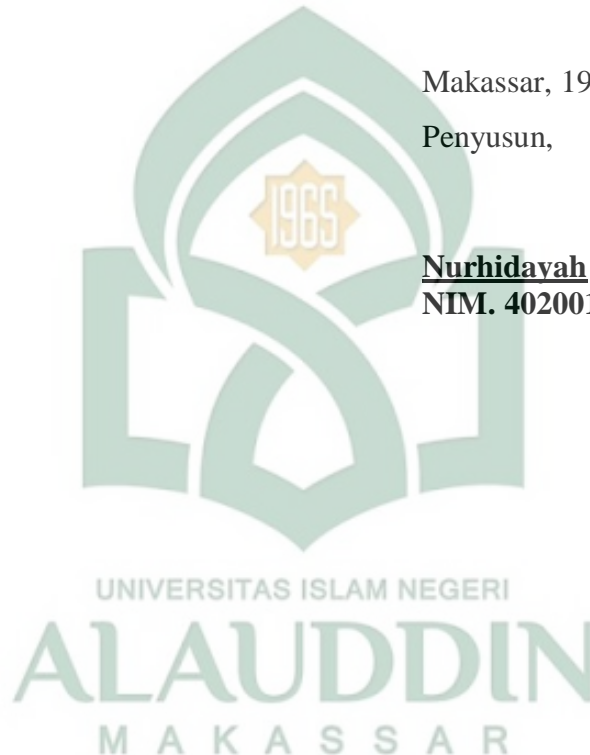
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Juli 2013

Penyusun,

Nurhidayah
NIM. 40200109034



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nurhidayah, Nim: 40200109034, mahasiswa Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "K. H. Abdurrahman Wahid (Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia)" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 19 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Barsihannor, M. Ag.

NIP. 19691012 199603 1 003

Drs. Muh. Idris, M.Pd.

NIP. 19690315 200003 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, ” K. H. Abdurrahman Wahid (Analisis Terhadap Pemikiran dan Peranan Politiknya di Indonesia)” yang disusun oleh Nurhidayah, NIM. 40200109034, mahasiswa Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari jumat, tanggal 26 Juli 2013 M, bertepatan dengan **1 Jumadil Awal 1429 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 21 Mei 2009 M.
1 Jumadil Awal 1429 H.

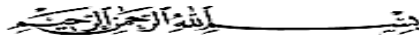
DEWAN PENGUJI:

Ketua	:	(.....)
Sekretaris	:	(.....)
Munaqisy I	:	(.....)
Munaqisy II	:	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Muh. Khalifah Mustami, M. Pd. (.....)
Pembimbing II	:	Drs. Muzakkir, M. Pd. I. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Salehuddin, M.Ag.
NIP. 19541212 198503 1 001

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang lebih patut penulis ucapkan kecuali hanya ucapan syukur yang sedalam-dalamnya disertai puja dan puji kehadiran Ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini melalui proses yang panjang. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. beserta keluarganya dan para sahabat.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. H. A. Mannan. H. dan ibunda Hj. Maryam Latif S.Pd.I serta paman Drs. H. Nurdin dan bibi Dra. Hj. Imrana Latif selaku orang tua kedua bagi penulis yang telah mengasuh, membimbing dan membiayai penulis selama dalam pendidikan, sampai selesainya skripsi ini, kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah swt mengasihi, dan mengampuni dosanya, amin. Demikian juga kepada kakak Abdul Hamid, S.Pd.I yang selalu mengiringi, membantu, dan memotivasi penulis mulai dari masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian studi penulis.

Penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.

3. Para wakil Dekan, Bapak Dr. H. Barsihannor, M. Ag. selaku wakil Dekan I, dan Ibu Dra. Susmihara, M. Pd. selaku wakil Dekan II, serta Bapak Dr. H. M. Dahlan, M. Ag. selaku wakil Dekan III Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
4. Drs. Rahmat, M.Pd.I dan Drs. Abu Haif, M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. H. Barsihannor, M. Ag. dan Drs. Muh. Idris, M. Pd., selaku pembimbing I dan II yang telah memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini dan yang membimbing penulis sampai taraf penyelesaian.
6. Dipertais, selaku pihak penyelenggara beasiswa yang diberikan kepada penulis selama berlangsungnya program studi.
7. Bapak Zainal Abidin, S.S., M. Hi., dan Andi Satrianingsih, Lc., selaku pengasuh serta pembimbing selama kami berada di asrama, yang tidak pernah lelah menghadapi “kenakalan kami”.
8. Para dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Adab dan Humaniora yang secara konkrit memberikan bantuannya baik langsung maupun tak langsung.
9. Teman-teman asrama, Nurfadilah Fajri Rahman, Kiki Erwinda, Sakina, Musdalifah, Marhani, Sarpiaty, Risnawati, Rosmida Rauf, Lydia Megawati, Suryanti, Erna Mardiana, Husaini Abu Bakar, Chaerul Mundzir, Ruhiyat, Yusri Bahjar, Muhammad Arif, Muhammad Husni, Ikbil, Syahril, yang telah penulis anggap sebagai saudara dan selalu memberikan semangat kepada penulis selama masa studi penulis.
10. Teman-teman sejurusan SKI, serta teman-teman KKN angkatan 48 Kec. Panca Lautang dan Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap.

Terlalu banyak orang yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, sehingga tidak sempat dan tidak akan muat bila namanya dicantumkan semua dalam ruang yang terbatas ini. Kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis menghanturkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya semoga Sang Khalik melimpahkan karuniaNya kepada semuanya atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan pada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini bahkan masih tergolong jauh dari kesempurnaan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu, penulis bersikap positif dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Hanya kepada Allah kita memohon taufik.

Makassar, 19 Juli 2013

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-10
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	2
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Kajian Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan	9
G. Garis-garis Besar Isi Skripsi	9
BAB II BIOGRAFI K.H. ABDURRAHMAN WAHID	11-34
A. Riwayat Hidup K. H. Abdurrahman Wahid	11
B. Pendidikan K. H. Abdurrahman Wahid	22
C. Perjalanan Karir K. H. Abdurrahman Wahid	32
BAB III PEMIKIRAN POLITIK K. H. ABDURRAHMAN WAHID	35-46
A. Islam dan Negara	36
B. Demokrasi	40
BAB IV PERANAN K. H. ABDURRAHMAN WAHID DALAM KANCAH PERPOLITIKAN DI INDONESIA	47-84
A. Peranan K. H. Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Ketua PBNU	47
B. Peranan K. H. Abdurrahman Wahid dalam Mendirikan dan Membesarkan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	56

C. Peranan K. H. Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Presiden RI	63
BAB V PENUTUP.....	85-86
A. Kesimpulan.....	85
B. Implikasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Nama : **Nurhidayah**

NIM : 40300109034

Judul Skripsi : K. H. Abdurrahman Wahid (Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia)

Skripsi yang berjudul K.H. Abdurrahman Wahid (Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia), menggambarkan pemikiran dan penanan politik Gus Dur di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid, 2) Bagaimana peran K.H. Abdurrahman Wahid dalam kancah perpolitikan Indonesia.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yakni heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, kritik sumber yang dilakukan dengan memverifikasi sumber yang telah terkumpul, interpretasi artinya memberikan penafsiran terhadap sumber yang telah dikritik dimana penulis berupaya membandingkan data yang ada dan menentukan data yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh dan kemudian mengambil kesimpulan, dan yang terakhir yakni historiografi atau penulisan sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa akar pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid sesungguhnya didasarkan pada komitmen kemanusiaan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Gus Dur, komitmen kemanusiaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tuntutan persoalan utama dalam kiprah politik umat Islam pada masyarakat modern dan pluralistik seperti di Indonesia. Adapun berbagai peran yang dilakukan Gus Dur dalam kancah perpolitikan Indonesia yakni: perannya di saat menjabat sebagai ketua PBNU, berhasil melakukan pemurnian NU sebagai organisasi agama dan mempelopori pengakuan terhadap pancasila, dan pelopor pendiri Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) serta merintis Forum Demokrasi (Fordem). Perannya terhadap PKB, dengan menggunakan ketokohan dan popularitas seorang Gus Dur serta pemberian restu Gus Dur sebagai ketua PBNU terhadap PKB maka partai ini dapat mendulang keberhasilan dalam pemilu 1999. Serta perannya sebagai presiden RI yang hingga saat ini dapat tetap dinikmati adalah pribumisasi dan dekonsentrasi TNI dan Polri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Sejarah merupakan sebuah dinamika yang diselimuti berbagai atribut kebesaran serta perjalanan menyusuri titian zaman. Sosok yang menyelimutinya merupakan sekumpulan kisah tokoh-tokoh yang hidup di zamannya. Dalam kamus umum bahasa Indonesia tokoh didefinisikan sebagai orang yang terkemuka.¹ Para tokoh ini memegang peran penting dalam menopang suatu negara ke arah kemajuan, baik itu sebelum negara tersebut merdeka maupun setelah merdeka.

Indonesia memiliki banyak tokoh sebagai tiang penyangga negara. Tokoh tersebut meliputi tokoh nasional dan tokoh agama. Walaupun keduanya memiliki konsep politik yang sedikit berbeda namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu demi kemajuan Indonesia.

Salah satu sosok tokoh Indonesia yang namanya tidak hanya masyhur di Indonesia tetapi juga amat akrab dengan banyak negara utamanya negara-negara Islam adalah K. H. Abdurrahman Wahid.

K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur merupakan salah satu cendekiawan muslim yang berhasil menduduki kekuasaan tertinggi dipemerintahan. Walaupun di balik itu, dia juga dikenal dengan sosok tokoh yang kontroversial, barangkali kata atau istilah inilah yang paling cocok untuk disematkan pada figur Gus Dur. Bisa jadi kekontroversialannya muncul

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa* (Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1476.

karena banyaknya kemampuan yang dimilikinya, sehingga sosok Gus Dur menjadi tidak lazim bagi mereka yang hanya menguasai suatu disiplin ilmu saja atau mungkin juga ia memiliki karakter unik yang berbeda dari manusia kebanyakan. Dalam pandangan banyak pihak Gus Dur memiliki tiga wajah yang menonjol yaitu sebagai tokoh agama, budaya, dan politik.²

Ketiga peran itu dimainkannya secara bergantian dalam kurung waktu yang sama. Ketika berada ditengah-tengah komunitas NU, dia berperan sebagai seorang ulama sekaligus sebagai ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU), ketika di Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dia berperan sebagai budayawan, tetapi ketika bertemu dengan Megawati, B. J. Habibie maka Gus Dur dapat dikatakan sedang memainkan peran politik. Jarang sekali kita memiliki tokoh agama seperti Gus Dur, sehingga sangat wajar kalau dia dianggap sarat dengan kontroversi.

Keistimewaan dan kekontroversialan K. H. Abdurrahman Wahid inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sosok Gus Dur yang sesungguhnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang, maka penulis menetapkan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana peranan K. H. Abdurrahman Wahid dalam kancah perpolitikan Indonesia?

²Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, ed., *Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid* (Cet. 2; Yogyakarta: LKIS, 2010), h. 1.

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghilangkan interpretasi yang keliru terhadap judul “K.H. Abdurrahman Wahid (Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia)”, maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang ada pada judul tersebut, yaitu:

1. Pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid

Pemikiran politik yang dimaksud oleh penulis adalah pandangan Gus Dur tentang berbagai hal yang berkaitan langsung dengan wacana kenegaraan baik itu yang merupakan ide pokok dari Gus Dur sendiri maupun pandangannya tentang berbagai problematika perpolitikan yang terjadi saat itu.

Berdasarkan konsep tersebut, penulis bermaksud menelusuri pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid dan pandangannya mengenai berbagai permasalahan yang hangat di bahas saat itu seperti permasalahan mengenai Islam dan negara dan termasuk permasalahan mengenai ideologi Pancasila, serta konsep pemikiran Gus Dur tentang pluralisme dan demokrasi.

2. Peranan politik K.H. Abdurrahman Wahid di Indonesia

Paranan politik K.H. Abdurrahman Wahid yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh Gus Dur demi menjaga persatuan bangsa Indonesia serta menggiring bangsa ini melangkah kearah yang lebih demokratis. Usaha ini mulai dilakukan bukan hanya setelah ia terjun langsung ke dalam pergolakan politik Indonesia namun jauh sebelum itu secara tidak langsung, ia telah memperlihatkan sumbangsihnya,

seperti saat ia menjabat sebagai ketua PBNU pada periode pertama, ia langsung memutuskan untuk melakukan pengakuan bahwa pancasila adalah asas tunggal negara Indonesia, karena saat itu telah banyak pihak yang ingin mengguncang hal tersebut dan bila dibiarkan maka kesatuan bangsa Indonesia akan runtuh.

Dalam tulisan ini, penulis akan memaparkan peranan perpolitikan K.H. Abdurrahman Wahid yang dimulai ketika ia menjabat sebagai ketua umum PBNU kemudian berlanjut ke perannya dalam mendirikan dan membesarkan PKB sampai pada perannya ketika mejadi presiden RI.

Sehingga secara keseluruhan ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup riwayat hidup K.H. Abdurrahman Wahid serta pemikiran dan peran politiknya dalam kancah perpolitikan indonesia.

D. *Kajian Pustaka*

Penulisan skripsi ini ditunjang oleh dua sumber yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksudkan oleh penulis adalah sumber utama yang menjadi landasan teori dalam penulisan skripsi ini seperti buku-buku yang membahas mengenai K.H. Abdurrahman Wahid secara detail, sedangkan sumber sekunder yang dimaksud adalah sumber penunjang yang digunakan oleh penulis seperti buku-buku penelitian serta buku-buku yang sepintas membahas tentang K. H. Abdurrahman Wahid.

Demi menguatkan landasan teori dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan oleh penulis diusahakan berasal dari penulis yang dekat dengan keseharian atau setidaknya mengenal sosok K. H. Abdurrahman Wahid secara langsung bukan mengenalnya dari opini-opini orang lain. Hal ini dimaksudkan

agar hasil dari penelitian ini akurat. Dengan pertimbangan tersebut sehingga penulis memilih tujuh buku berikut sebagai sumber primer dalam penulisan skripsi ini.

1. *Biografi Gus Dur* yang ditulis oleh Greg Barton, penerbit LKIS Group tahun 2012. Buku ini menceritakan tentang silsilah keluarga K.H. Abdurrahman Wahid serta pendidikannya. Dalam bidang politik, buku ini bercerita mengenai perjuangan K. H. Abdurrahman Wahid dalam mencapai kursi tertinggi dalam pemerintahan serta konflik politik yang terjadi dimasa pemerintahannya.
2. *Gila Gus Dur* yang ditulis oleh Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, penerbit LKIS Group tahun 2000. Dalam buku ini dibahas mengenai upaya memahami sosok kontroversial Gus Dur serta beberapa opini mengenai sosok K. H. Abdurrahman Wahid dimata beberapa tokoh politik lainnya.
3. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur* yang ditulis oleh Ali Masykur Musa, penerbit erlangga tahun 2010. Buku ini memaparkan mengenai perjalanan politik K.H. Abdurrahman Wahid serta landasan pemikirannya.
4. *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer* yang ditulis oleh John L.Esposito dan John O. Voll, penerbit Raja Grafindo Persada tahun 2002. Buku ini menjelaskan tentang beberapa tokoh Islam salah satu diantaranya adalah K. H. Abdurrahman Wahid. Khusus untuk pembahasan mengenai K. H. Abdurrahman Wahid, buku ini berbicara seputar pendidikannya serta landasan pemikirannya.

5. *Ada Apa dengan Gus Dur* yang ditulis oleh Achmad Mufin AR, penerbit Kutub tahun 2005. Dalam buku ini dikupas mengenai biografi Gus Dur, dan perjalanan karirnya serta pemikiran Gus Dur tentang demokrasi pesantren.
6. *Demokrasi Aja Kok Repot* yang ditulis oleh Nur Kholisoh, penerbit Pohon Cahaya tahun 2012. Dalam buku ini dipaparkan pergulatan politik Gus Dur dan perjuangannya dalam menyuarakan demokrasi.
7. *Menuju Partai Advokasi* yang ditulis oleh Koirudin, penerbit Pustaka Tokoh Bangsa tahun 2005. Dalam buku ini dipaparkan sejarah lahir dan berkembangnya PKB dan peran Gus Dur dalam menyokong partai ini serta berbagai dinamika yang terjadi dalam tubuh partai PKB.
8. *Prisma Pemikiran Gus Dur* yang ditulis oleh K.H. Abdurrahman Wahid, penerbit LKIS Yogyakarta 2000. Buku ini merupakan kumpulan artikel yang pernah ditulis oleh Gus Dur semasa hidupnya. Dalam buku ini membahas mengenai pemikian sosial politik Gus Dur.

Selain referensi yang disebutkan di atas, masih banyak lagi referensi lain yang penulis gunakan sebagai sumber sekunder, baik itu yang membahas tentang K. H. Abdurrahman Wahid maupun tentang materi penelitian sebagai panduan penulis dalam menjalankan penelitian ini. Selain dari buku-buku, penulis juga memperoleh sumber referensi dari situs-situs pribadi serta berbagai situs resmi.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, skripsi ini bukanlah skripsi pertama yang membahas tentang Gus Dur, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang membahas tentang K.H. Abdurrahman Wahid, namun memiliki perbedaan yang mendasar dengan skripsi ini. Umumnya skripsi tersebut membahas mengenai pandangan K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan

sebagian kecil pun telah ada yang membahas tentang perpolitikan K.H. Abdurrahman Wahid, namun belum ada yang membahas secara lengkap mengenai landasan pemikiran serta peran K.H. Abdurrahman Wahid dalam kancah perpolitikan Indonesia.

E. Metodologi Penelitian

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik atau pengumpulan sumber sejarah yang berhubungan dengan pembahasan penulisan skripsi ini, dilakukan dengan cara membaca berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan.

Mengingat sifatnya yang sistematis, maka tahap-tahap dari metode sejarah tidak dapat ditukar balik atau mendahulukan kritik, interpretasi ataupun historiografi. Semua jenis tulisan atau penelitian tentang sejarah menempatkan sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada.³ Hal ini menggambarkan bahwa heuristik merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam penelitian sejarah.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber untuk menentukan otensitas dan kredibilitas sumber sejarah. Semua sumber yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum digunakan.⁴ Sehingga penelitian akan lebih sistimatis dan obyektif.

³Saleh Madjid dan Abd Rahman Hamid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet. 1; Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), h. 49.

⁴*Ibid.*, h. 53.

3. Interpretasi

Tahap ketiga dalam metode sejarah ialah interpretasi. Sebelum sampai pada tahap historiografi terlebih dahulu fakta sejarah tersebut digabungkan dan dijelaskan atau diberi penafsiran terhadap sumber yang sudah melalui kritik dimana penulis berupaya membandingkan data yang ada dan menentukan data yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh, kemudian mengambil sebuah kesimpulan.

Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif peneliti, terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah. Agar ditemukan kesimpulan atau gambaran sejarah yang ilmiah.⁵

4. Historiografi

Historiografi merupakan puncak dari segala-galanya dalam metode penelitian sejarah. Penulis pada fase ini mencoba menangkap dan memahami *histoire ralite* atau sejarah sebagaimana terjadinya.⁶ Pada tahap ini penulis minimal harus menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer atau deskriptif mengenai: apa, siapa, kapan, dan bagaimana peristiwa sejarah itu terjadi dan kemudian menuliskannya secara sistematis. Penulisan sejarah ini dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan sebelumnya sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah.

⁵*Ibid.*, h. 56.

⁶Taufik Abdullah dan Abdurrahman Sorjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi* (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 15.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Secara operasional tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk memahami pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid
- b. Untuk menelusuri peranan K.H. Abdurrahman Wahid dalam kancah perpolitikan Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai sosok K. H. Abdurrahman Wahid serta diharapkan mampu membuka mata masyarakat mengenai perjuangan yang dilakukannya demi Islam dan Indonesia.

G. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memberikan gambaran pokok tentang isi skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisannya.

Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar sebelum memasuki pembahasan dan memberi batasan tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah yang di dalamnya memaparkan alasan peneliti memilih judul tersebut. Dari latar belakang tersebut melahirkan rumusan masalah. Selanjutnya definisi operasional, kajian pustaka, dan metode penelitian serta tujuan dan kegunaan penelitian dan dilengkapi dengan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Biografi K.H. Abdurrahman Wahid yang meliputi silsilah keluarganya, kelahirannya, pendidikannya, sampai pada karirnya.

Bab III Pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid. Bab ini berisikan landasan pemikiran politik Gus Dur.

Bab IV Peranan K.H. Abdurrahman Wahid dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas mengenai peranan K.H. Abdurrahman Wahid di PBNU, PKB dan saat ia menjabat sebagai presiden RI.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta dilengkapi implikasi.



BAB II

BIOGRAFI K. H. ABDURRAHMAN WAHID

A. *Riwayat Hidup K. H. Abdurrahman Wahid*

1. Gus Dur dan Kehidupan Masa Kecilnya

Abdurrahman Ad-Dakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal “Ad-Dakhil” berarti “sang penakluk”. Sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tongkat kejayaan Islam di Spanyol.¹

Belakangan kata “Ad-Dakhil” tidak cukup dikenal dan kemudian diganti dengan nama Abdurrahman Wahid yang kemudian akrab disapa dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas.

Gus Dur dilahirkan di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syamsuri. Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus tetapi sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam kehidupannya dan juga kepribadiannya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan tetapi tanggal itu adalah menurut kalender Islam yaitu pada tanggal 4 Sya’ban yang bertepatan pada tanggal 7 September 1940.²

¹Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), h. 35.

²*Ibid.*, h. 25.

Gus Dur adalah putra pertama dari pasangan Wahid Hasyim dan Sholehah. Dia anak pertama dari enam bersaudara.³ Secara genetik Gus Dur merupakan keturunan darah biru. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Hj. Sholehah adalah putri pendiri pesantren Denayar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya juga merupakan tokoh NU. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua Ulama NU sekaligus dua tokoh besar di Indonesia.⁴

Pada tahun 1948, ketika perjanjian perdamaian sudah ditanda tangani dari pihak Belanda, para pejuang Indonesia akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarga mereka tanpa diselimu dengan bayang-bayang ketakutan. Begitu pula dengan ayah Gus Dur, Wahid Hasim yang merupakan tokoh agama yang ikut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Wahid Hasyim yang kala itu telah berbahagia dengan kelahiran putrinya yaitu Chodijah (Lili). Akan tetapi, karena ia terlibat dalam kegiatan pemerintahan yang baru maka ia sekeluarga harus pindah ke Jakarta. Pada bulan Desember 1949, Wahid Hayim dan Gus Dur berangkat ke Jakarta untuk menyiapkan rumah bagi anggota keluarga lainnya. Ini bukan kali pertama Gus Dur ke Jakarta karena sebelumnya ia sudah beberapa kali ke Jakarta mendampingi ayahnya. Saat itu, Wahid Hasyim sudah memegang jabatan sebagai Menteri

³*Ibid.*, h. 35-46.

⁴Achmad Mufid AR, *Ada Apa dengan Gus Dur* (Cet. 1; Yogyakarta: Kutub, 2005), h. 3.

Agama. Ia menduduki jabatan selama lima kabinet dan baru melepaskannya pada bulan April 1952.⁵

Suasana rumah baru Gus Dur yang bertempat di Matraman hampir sama dengan suasana di rumah kakeknya, K.H. Hasyim Asy'ari yang selalu ramai dikunjungi oleh tamu-tamu yang terdiri dari para tokoh dari berbagai bidang profesi. Hal ini memberikan pengalaman tersendiri bagi Gus Dur. Secara tidak langsung, Gus Dur juga mulai berkenalan dengan dunia politik yang didengar dari kolega ayahnya yang sering mangkal di rumah. Berkat teman ayahnya juga Gus Dur menjadi tertarik dengan musik klasik Eropa khususnya karya-karya Beethoven. Bahkan sering kali Wahid Hasyim mengirim Gus Dur ke rumah Williem Iskandar Bueller sepanjang sore hari selepas sekolah untuk belajar musik klasik tersebut.⁶

Di balik semua pembelajaran yang dialami Gus Dur sejak dini, dia tetap seorang anak-anak yang kerap melakukan kenakalan. Menurut sanak saudaranya yang lebih tua, Gus Dur adalah anak yang tumbuh subur dan tidak bisa ditekan. Dengan kata lain, ia sering menunjukkan kenakalannya. Ia sering terlihat diikat dengan tambang di tiang bendera di halaman depan sebagai hukuman bagi leluconnya yang terlalu jauh atau sikapnya yang kurang sopan. Ketika belum genap berusia 12 tahun, Gus Dur telah dua kali mengalami patah lengan akibat kegemarannya memanjat pohon. Pertama lengannya patah karena dahan yang diinjaknya patah. Yang kedua kalinya ia hampir kehilangan tangannya, ketika itu ia mengambil makanan di dapur dan

⁵Greg Barton, *op. cit.*, h. 39.

⁶*Ibid.*, h. 41.

kemudian memakannya di atas sebuah pohon besar. Karena keenakan di atas pohon, ia tertidur dan kemudian mengelinding jatuh. Saat itu dia mengalami patah tulang serius sehingga tulang lengannya menonjol keluar. Dokter pertama yang merawat tulang lengannya khawatir, ia mungkin akan kehilangan lengannya tetapi untunglah berkat tindakan dokter yang cekatan tulang yang patah itu dapat sembuh kembali. Akan tetapi pengalaman ini hampir tidak berpengaruh terhadap dirinya karena Gus Dur muda tetap kurang berhati-hati dan selalu bertindak impulsif.⁷

Selama bertahun-tahun tinggal di Jakarta, Gus Dur sering berada bersama ayahnya dan sering menemaninya pergi ke pertemuan-pertemuan, baik itu sewaktu ayahnya masih menduduki kursi Menteri Agama maupun setelah dia turun dari jabatannya. Ini semua dilakukan sang ayah karena ia merasa senang ditemani oleh putranya dan juga karena hal ini dianggap merupakan bagian penting dari pendidikan anak sulungnya ini.

Pada hari Sabtu tanggal 18 April 1953, Gus Dur bepergian menemani ayahnya untuk menghadiri rapat NU di Sumedang, sebelah Tenggara Jakarta, yang dapat ditempuh dengan mobil dalam waktu beberapa jam saja. Ketika mereka berada di antara Cimahi dan Bandung hujan turun cukup lebat sehingga membuat jalan menjadi licin, keadaan ini mengakibatkan mobil mereka selip dan menabrak truk yang sedang berhenti. Hal ini mengakibatkan dua penumpang yang duduk di belakang yakni Wahid Hasyim dan Argo Sutjipto terlempar keluar sedangkan Gus Dur dan supir tidak mengalami luka apapun. Wahid Hasyim mengalami luka serius di

⁷*Ibid.*, h. 40.

kepala dan kening, satu sisi dari muka dan lehernya terkoyak dan memar. Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 01.00 siang tapi mobil ambulan dari Bandung baru tiba sekitar pukul 04.00 sore. Keesokan harinya tanggal 19 April 1953, tepatnya pada pukul 10.30 pagi, Wahid Hasyim tidak dapat bertahan lagi dan akhirnya meninggal dunia, beberapa jam kemudian Argo Sutjipto juga ikut berpulang ke Rahmatullah. Wahid Hasyim meninggal pada usia 38 tahun. ia dimakamkan di Jombang tepatnya di Pesantren Tebuireng. kematian ayahnya yang disaksikan oleh Gus Dur yang saat itu masih berumur 12 tahun membawa pengaruh tersendiri dalam kehidupannya.⁸

Beberapa tahun setelah kematian ayahnya, Gus Dur dikirim ke Yogyakarta. Bagi anak-anak seusia Gus Dur saat itu, pelajaran di pesantren membuat waktu mereka tersita dan tidak banyak waktu untuk bersantai. Tetapi lain halnya dengan Gus Dur, pelajaran di pesantren dapat dicerna dengan mudah tanpa harus berusaha keras akibatnya dia selalu memiliki banyak waktu untuk bersantai. Sebagian besar waktu senggangnya dihabiskan untuk meluangkan hobinya, seperti membaca tapi bukan bacaan yang berkaitan dengan pelajaran pesantren melainkan buku-buku cerita terutama tentang cerita silat dan peperangan, menonton pertunjukan wayang kulit, menonton di bioskop, menonton sepak bola, main catur dan berbagai permainan yang dimainkan anak seusianya. Selama tinggal di Yogyakarta sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menonton film.⁹

⁸Saifullah Ma'shum, ed., *Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU* (Cet. 1; Bandung: Mizan, 1998), h. 313-314.

⁹Greg Barton, *op. cit.*, h. 54-55.

Setelah remaja Gus Dur pindah ke Magelang dan kemudian ke Jombang. Kehidupannya di sana tidak jauh berbeda dari rutinitas yang dilakukan di Yogyakarta. Hobi membaca Gus Dur tetap kuat berakar hanya saja teks bacaannya yang sedikit berbeda. Sekarang Gus Dur lebih menyenangi novel-novel Inggris, Prancis, dan Rusia serta buku-buku tentang pemikiran sosial Eropa.¹⁰

Pada tahun 1963 Gus Dur pindah ke Mesir untuk melanjutkan studinya setelah beberapa lama di sana ia kemudian pindah ke Baghdad dengan tujuan yang sama yakni menuntut ilmu di suatu Universitas. Setelah studinya selesai, pada pertengahan tahun 1970-an Gus Dur kemudian pindah ke Eropa. Baru pada pertengahan tahun 1971, ia kembali ke Indonesia.

2. Kehidupan Keluarga Kecil Gus Dur

Di Jombang, Gus Dur mengalami suatu pertemuan yang jauh lebih penting daripada pertemuannya dengan karya-karya sastra dari pengarang-pengarang terkenal. Ketika ia mulai mengajar di Madrasah Tambakberas pada awal tahun 1960-an, ia mulai tertarik pada seorang siswi yang bernama Nuriyah. Gadis ini adalah salah satu gadis yang paling menarik di kelasnya. Ia cerdas dan berfikir bebas sehingga menarik perhatian sejumlah pemuda di lingkungan pesantren. Gus Dur tetap berusaha mendapatkan gadis pujaannya walaupun baginya cukup mengherankan apabila ia bisa tertarik pada sang guru yang agak canggung, seorang kutu buku, agak gemuk dan lagi pula mengenakan kacamata besar dan tebal. Sayangnya, pada tahun 1963 Gus Dur harus berangkat ke Kairo untuk melanjutkan studinya di Al-Azhar.

¹⁰*Ibid.*, h. 56.

Pada awalnya hubungan Gus Dur dengan Nuriyah tidak begitu mulus, namun kemudian hubungan ini menjadi lebih dalam karena korespondensi yang teratur. Menjelang tahun 1966, Nuriyah menerima Gus Dur sebagai teman hidupnya. Pada tanggal 11 Juni 1968 Gus Dur menikahi Nuriyah, namun saat akad nikah Gus Dur hanya diwakili oleh kakeknya Kiai Bisryi Syamsuri karena saat itu ia masih berada di Baghdad.¹¹

Penantian Nuriyah yang cukup panjang akhirnya berakhir saat kepulangan Gus Dur dari Eropa. Pada bulan September 1971, berlangsunglah pesta pernikahan Gus Dur dan Nuriyah. Setelah itu mereka tinggal di Jombang dan Gus Dur sendiri terus berkeliling Jawa. Dari pernikahan Gus Dur dan Nuriyah, ia dikaruniai empat orang putri, yakni Alissa Munawarah, Zannubah Arifah Rahman, Anita (Chayatunnufus), dan Inayah.¹²

Kehidupan Gus Dur dan istrinya Nuriyah berjalan baik. Rumah baru mereka yang sederhana di kompleks pesantren Kiai Bisri Syamsuri telah selesai dibangun. Saat itu putri pertama mereka, Alissa baru saja lahir, namun kondisi keuangan keluarga ini masih belum sepenuhnya baik. Istri Gus Dur, Nuriyah memilih menjual kacang tayamum di lingkungan pesantren agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Rutinitas Nuriyah ini dilakukan sampai anaknya Yenni dan Anita lahir. Nuriyah cukup kewalahan dalam mengurus bisnisnya sekaligus merawat tiga orang putrinya sehingga Gus Dur selalu meluangkan waktunya untuk membantu istrinya merawat anak-anak mereka. Namun, setelah mereka pindah ke Ciganjur yang terletak

¹¹Achmad Mufid AR, *op. cit.*, h. 24.

¹²*Ibid.*, h. 25.

dipinggiran selatan Jakarta, ia tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk membantu istrinya. Rumah mereka di Ciganjur tergolong rumah yang sangat sederhana. Rumah ini terletak di tengah-tengah sebuah lapangan luas yang selalu banjir. Rumah-rumah lain terletak berjauhan. Selama musim hujan, rumah ini dikelilingi oleh lumpur yang kedalamannya mencapai beberapa sentimeter. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa rumah ini sangat kecil, saat itu mereka tidak mampu membeli rumah yang lebih besar dari pada itu. Untunglah, tidak lama setelah Inayah lahir, mereka sudah bisa pindah kesuatu tempat yang berjarak beberapa kilometer di sebelah utara Cilandak. Di sini mereka menyewa rumah yang lebih besar dan lebih nyaman. Rumah ini cukup luas untuk sebuah keluarga dengan empat orang gadis kecil.¹³

Pada tahun 1987, Gus Dur dan Nuriyah kembali pindah rumah. Rumah baru yang mereka tempati ini masih merupakan rumah sewa sederhana yang terletak jauh dari Jakarta Pusat dan juga jauh dari kantor PBNU, tetapi rumah ini mempunyai lebih banyak ruang untuk empat gadisnya. Saat itu, Inayah telah siap bersekolah, Alissa dan Yenny telah memulai sekolah menengah, sedangkan Anita telah hampir menyelesaikan sekolah dasar. Mereka adalah keluarga yang intim, hanya saja Gus Dur jarang dapat bersama dengan mereka.¹⁴

¹³Greg Barton, *op. cit.*, h. 132.

¹⁴*Ibid.*, h. 183.

Setelah Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebenarnya, ia tidak mendapat gaji khusus, bahkan sekarang Gus Dur tidak lagi bisa mendapat penghasilan tambahan dengan menulis artikel di majalah-majalah. Tetapi ada saja pihak yang memberi bantuan kepada keluarga mereka hingga keadaan perekonomian keluarga mereka membaik.

Sejak pindah ke Jakarta, Gus Dur disibukkan oleh ceramah-ceramah dan masalah NU terlebih lagi setelah ia memangku jabatan sebagai ketua PBNU. Seringkali ia pulang kerumah larut malam setelah mengadakan pertemuan dan perjalanan di luar Jawa. Bahkan bila di rumah, kebanyakan waktunya dihabiskan untuk menerima tamu. Hal ini membuat istrinya Nuriyah dan juga putri-putri mereka merasa bahwa Gus Dur tidak lagi mempunyai waktu untuk mereka.

Di tambah lagi Gus Dur buka tipe orang yang senang menunjukkan kasih sayangnya. Bahkan, bila Gus Dur dan Nuriyah beradu argumentasi atau mengalami kesalah pahaman maka penyelesaiannya selalu dilakukan dengan bertukar surat. Jika Gus Dur melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf pada Nuriyah maka ia akan menulis surat dan meletakkannya di bawah bantal sang istri.

Sikap Gus Dur ini menuai protes keras dari putri-putri mereka, Gus Dur pun berusaha keras untuk memenuhi keinginan keluarganya. Namun, tidak disangka jadwalnya semakin padat saja. Hal ini membuat anak-anak gadisnya merasa benci karena tampaknya seluruh dunia lebih berhak atas waktu sang ayah dari pada mereka, anaknya sendiri. Saat anak-anaknya

beranjak remaja akhirnya mereka mengerti pekerjaan ayah mereka dan telah memahami bahwa bangsa ini memerlukan ayahnya.¹⁵

3. Penyakit yang Menderanya

Sekitar tahun 1977, tepatnya pada saat usia Gus Dur telah masuk 37 tahun, ia mengalami kecelakaan. Ketika Gus Dur sedang berbelok ke lingkungan Pesantren Denayar dengan skuter vespanya, ia ditabrak oleh mobil. Walaupun tidak mengalami patah tulang, tabrakan ini cukup keras untuk membuat retina mata kirinya terlepas. Dokter spesialis di Jakarta memberitahunya bahwa retina ini akan menyatu kembali apabila ia cukup beristirahat. Sayangnya, Gus Dur bukanlah orang yang bisa berdiam diri. Baru saja beberapa hari ia beristirahat, ia sudah mulai membaca buku, menulis, dan menyampaikan makalah-makalah seminar. Akibatnya retina itu tidak menyatu kembali dengan baik dan ia terpaksa menjalani operasi demi membuat retina matanya menempel kembali dengan baik ke bola matanya, namun mata kirinya tidak lagi bisa berfungsi dengan baik.¹⁶

Ketika Gus Dur berusia 50 tahun, mata kanannya berangsur-angsur kehilangan pengelihan karena efek dari penyakit diabetes yang dideritanya. Di tambah lagi saat itu ia kelebihan berat badan sebesar 30 kg, sehingga menyulitkannya untuk bergerak. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk terus beraktivitas.¹⁷

¹⁵*Ibid.*, h. 187.

¹⁶*Ibid.*, h. 125.

¹⁷*Ibid.*, h. 214.

Pada malam tanggal 19 Januari 1998, saat Hasyim, adik Gus Dur yang bungsu mengunjunginya, ia mendapati kakaknya tidak sadarkan diri di lantai kamar mandi. Saudara Gus Dur, Umar yang berprofesi sebagai dokter mengumpulkan teman-temannya yang merupakan ahli bedah syaraf terbaik di Indonesia untuk berunding.

Menurut mereka tampaknya Gus Dur tidak akan bertahan hidup. Tekanan darahnya meningkat hingga ke tingkat fatal serta denyut nadi dan tanda-tanda vital lainnya menunjukkan ia nyaris menghadapi maut. Diagnosis yang diberikan adalah bahwa ia menderita stroke berat. Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini adalah dengan melakukan pembedahan darurat yang penuh resiko dan memasukkan sebuah pipa kecil untuk mengeluarkan cairan dari tengkorak kepalanya. Akan tetapi malam itu tidak mungkin dilakukan pembedahan karena kondisi Gus Dur yang sangat lemah. Akhirnya para dokter menundanya hingga keesokan harinya. Walaupun ada beberapa dokter yang tidak setuju dengan operasi ini dengan alasan kemungkinan sembuh sangat tipis dan besar kemungkinan pasien akan meninggal di meja operasi. Namun adik Gus Dur, Umar tetap bersikeras dan pada akhirnya operasi ini berjalan baik. Dalam beberapa jam kemudian, Gus Dur telah melewati masa kritisnya.¹⁸

Keesokan harinya Gus Dur telah mampu berbicara dan kelihatannya ia telah melewati serangan stroke dan bedah otak dengan baik walaupun ia masih dalam keadaan yang sangat lemah. Hari-hari berikutnya, kesehatan Gus Dur makin membaik. Walaupun setelah ini, ia harus duduk di kursi roda

¹⁸*Ibid.*, h. 304.

dengan pengelihan yang tidak begitu jelas. Penurunan berat badan Gus Dur yang merupakan efek dari konsinya yang kurang baik akhirnya membuatnya kelihatan lebih segar dan sehat.¹⁹

Pada tanggal 30 Desember 2009, kondisi kesehatan Gus Dur kembali memburuk, ia mengeluh sakit pada bokong kanan hingga ke tungkai dan kakinya. Dokter menemukan ada enam lokasi pada pembuluh darah arteri Gus Dur yang mengalami penyumbatan. Walaupun upaya medis terus dilakukan namun Gus Dur sudah tidak dapat bertahan lagi. Pada pukul 18.30 Gus Dur menghembuskan nafas terakhirnya.²⁰

B. Pendidikan K. H. Abdurrahman Wahid

Pertama kali belajar, Gus Dur kecil belajar langsung pada sang kakek, K.H. Hasyim Asy'ari. Saat serumah dengan kakeknya dia diajari membaca Al-Quran. Pada usia lima tahun ia telah lancar membaca Al-Quran.

Saat keluarga Gus Dur pindah ke Jakarta, Gus Dur memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar KRIS di Jakarta Pusat. Walaupun ayahnya adalah seorang menteri dan terkenal dikalangan pemerintahan Jakarta. Akan tetapi Gus Dur tidak pernah bersekolah di sekolah elit dan lebih menyukai sekolah-sekolah biasa. Saat Gus Dur telah duduk di kelas lima, ia kemudian pindah ke Sekolah Dasar Matraman Perwari yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya yang baru di Matraman Jakarta Pusat.²¹

¹⁹*Ibid.*, h. 323.

²⁰Warta, "Kronologi Perawatan Gus Dur," *Situs Resmi NU*. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,20909-lang,id-c,warta-t,Kronologi+Perawatan+Gus+Dur-.phpx> (23 Juni 2013).

²¹Greg Barton, *op. cit.*, h. 42.

Selain belajar di sekolah formal, Gus Dur juga rajin mengikuti les privat bahasa Belanda. Guru privatnya tidak lain adalah teman ayahnya sendiri yakni Williem Iskandar Bueller, orang yang sama yang mengajarkan Gus Dur musik klasik Eropa.²² Walaupun pendidikan Gus Dur sepenuhnya bersifat sekuler, namun ia tetap mempelajari bahasa Arab dibawah pengawasan ayahnya. Apalagi di rumahnya terdapat banyak buku, koran, majalah dalam berbagai bahasa sehingga semakin menambah motivasi Gus Dur untuk belajar bahasa asing dan membuat cakrawala berfikir Gus Dur dan saudara-saudaranya semakin terbuka.

Kegemaran Gus Dur membaca telah muncul pada usia yang masih sangat muda, hal ini memungkinkan Gus Dur untuk belajar secara otodidak. Rasa ingin tahu yang besar makin menambah semangat belajarnya. Wahid Hasyim, sebagai orang tua selalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam hal belajar. Hal ini membuahkan hasil yang positif, dengan suport dari orang tuanya dan semangat belajar yang tinggi Gus Dur selalu menorehkan prestasi di sekolahnya. Seperti saat menjelang kelulusannya di Sekolah Dasar, Gus Dur memenangkan lomba karya tulis (mengarang) se-kota Jakarta.²³

Pada tahun 1954, setahun setelah ia menamatkan Sekolah Dasar dan memulai sekolah di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama), Gus Dur tidak lagi terlihat sebagai siswa yang cemerlang, bahkan ia terpaksa mengulang kelas satu karena gagal dalam ujian. Kegagalan ini jelas disebabkan seringnya ia menonton pertandingan sepak bola sehingga dia tidak mempunyai cukup waktu

²²*Ibid.*, h. 41.

²³Nur Kholiq, "Pribumisasi Islam dalam Perspektif Gus Dur: studi kritis terhadap buku Islamku, Islam anda, dan Islam kita" (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), h. 29.

untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sebenarnya Gus Dur merupakan siswa yang cerdas tetapi dia sering kali merasa bosan dalam mengikuti pelajaran di kelas, dia merasa pelajaran yang diterimanya di kelas tidak cukup menantang buatnya sehingga ia lebih memilih belajar sendiri dengan membaca buku.

Melihat perkembangan putra sulungnya yang kurang berhasil dalam pelajaran sekolahnya, ibunda Gus Dur mengirimnya ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah SMP di sana. Di kota ini, dia tinggal di rumah salah seorang teman ayahnya, Kiai Junaidi yang merupakan anggota Majelis Tarjih atau Dewan Penasehat Agama Muhammadiyah.²⁴ Keputusan ibunda Gus Dur yang mengirim putranya ke Yogyakarta untuk belajar sangatlah tepat karena dengan itu semangat belajar Gus Dur kembali berkobar. Di sekolah ini, Gus Dur mengalami peningkatan yang cukup pesat terutama di bidang bahasa. Dia sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik dan dapat membaca tulisan dalam bahasa Prancis. Sebelumnya juga Gus Dur telah menguasai bahasa Belanda dari les Privat. Dengan kemampuan Gus Dur yang telah menguasai beberapa bahasa asing membuat kemampuan membaca Gus Dur melesat jauh.

Untuk melengkapi pendidikan Gus Dur maka diaturlah agar ia dapat pergi ke Pesantren Al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu. Pesantren ini terletak di luar kota Yogyakarta. Di sini, ia belajar bahasa Arab kepada K.H. Ali Ma'shum.²⁵ Padatnya jadwal Gus Dur yang sekolah di dua tempat dalam kurung waktu yang sama tidak membuatnya kehilangan waktu untuk menjalankan semua

²⁴Greg Barton, *op. cit.*, h. 49.

²⁵*Ibid.*, h. 51.

hobinya. Dia tetap bisa melakukan semua yang dia sukai tanpa mengesampingkan tugas utamanya sebagai pelajar.

Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di Yogyakarta pada tahun 1957, Gus Dur mulai mengikuti pelajaran di pesantren secara penuh. Ia bergabung di Pesantren Tegalrejo di Magelang, yang terletak di sebelah utara Yogyakarta. Ia tinggal di pesantren ini hingga pertengahan tahun 1959. Di sini, ia belajar kepada Kiai Khudori yang merupakan salah satu pemuka NU. Pada saat yang sama, ia juga belajar paruh waktu di Pesantren Denanyar, Jombang dan dibimbing langsung oleh kakek dari pihak ibunya yakni Kiai Bisri Syamsuri.²⁶

Gus Dur membuktikan dirinya sebagai siswa yang berbakat dengan menyelesaikan pelajarannya di Tegalrejo di bawah asuhan Kiai Khudori selama dua tahun. kebanyakan siswa lain memerlukan empat tahun untuk menyelesaikan pelajaran di pesantren ini. Bahkan di Tegalrejo Gus Dur menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membaca buku-buku barat kegemarannya serta menonton film yang sudah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari Gus Dur.

Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke Jombang untuk belajar secara penuh di Pesantren Tambakberas di bawah bimbingan Kiai Wahab Chasbullah. Ia belajar di sini hingga tahun 1963 dan selama kurun waktu itu ia selalu berhubungan dengan Kiai Bisri Syamsuri. Selama tahun pertamanya di Tambakberas, Gus Dur mendapat dorongan untuk mulai mengajar. Ia kemudian mengajar di madrasah modern yang didirikan di kompleks pesantren dan juga

²⁶*Ibid.*, h. 52.

menjadi kepala sekolahnya. Selama masa ini, ia tetap berkunjung ke Krapyak secara teratur.²⁷

Pengembaraan ilmu yang dilakukan oleh Gus Dur tidak hanya sampai di sini, rasa kurang puas dengan apa yang didupatkannya selama ini membuatnya berani melangkah lebih jauh demi menuntut ilmu. Pada bulan November 1963 Gus Dur berangkat ke Kairo, Mesir karena mendapatkan beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di universitas terkenal yang telah berusia ribuan tahun yaitu Al-Azhar.

Meskipun pada awalnya Gus Dur sangat bersemangat dengan studinya di Al-Azhar, tetapi sesampainya di sana ia merasa sangat kecewa sebab masa keemasan Al-Azhar telah mencapai puncaknya beberapa dasawarsa sebelumnya. Ditambah lagi tingkat pertama di universitas ini tidak menawarkan banyak hal baru bagi seorang lulusan sejumlah pesantren terbaik di Indonesia.

Pada saat Gus Dur tiba di Al-Azhar, ia diberitahu oleh pejabat-pejabat universitas bahwa dirinya harus mengikuti kelas khusus untuk memperbaiki pengetahuan mengenai bahasa arab. Sebenarnya Gus Dur telah mempunyai sertifikat yang menunjukkan bahwa ia telah lulus studi yurisprudensi Islam, teologi, dan pokok-pokok pelajaran lain yang terkait, yang kesemuanya itu memerlukan pengetahuan bahasa arab yang sangat baik, namun sayangnya ia tidak mempunyai ijazah yang menunjukkan bahwa ia telah lulus kelas dasar bahasa arab. Sebagai akibatnya, dia dimasukkan ke kelas yang benar-benar pemula.²⁸

²⁷*Ibid.*, h. 53.

²⁸*Ibid.*, h. 88.

Kelas dasar ini membuat Gus Dur sangat merasa bosan karena hampir semua yang dipelajari di kelas ini telah ia dapat di pesantren sebelumnya. Sepanjang tahun 1964 ia hampir tidak pernah masuk kelas pemula itu. Ia malah menyalurkan hobinya mengikuti pertandingan sepak bola yang banyak terdapat di Kairo, membaca di perpustakaan-perpustakaan yang besar, menonton film-film Prancis, dan ikut serta dalam diskusi-diskusi di kedai-kedai kopi.

Kota Kairo menjadi kota kebebasan bagi Gus Dur, dia dapat melakukan apapun tanpa terikat oleh waktu dan jadwal yang padat. Di kota ini pula Gus Dur terpilih menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia, yang merupakan organisasi yang menjadi penghubung para mahasiswa yang belajar di seluruh Timur Tengah.

Di balik kesenangan yang di dapat Gus Dur di kota Kairo, ia tidak melupakan tujuan utama ia berada di negara orang. Gus Dur mungkin saja hanya mengikuti sebagian kecil kegiatan di kelas bahasa Arab, tetapi ia tidak pernah melewatkan ujian-ujian akhir. Ketika pejabat-pejabat universitas membaca kertas ujiannya, akhirnya mereka sadar bahwa mereka telah salah menempatkan mahasiswa ini di kelas pemula. Dan akhirnya, Gus Dur pun dapat memasuki Institut Studi Islam dan Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar.²⁹

Kelas baru Gus Dur ternyata sama membosankannya dengan kelas dasar bahasa Arab. Al-Azhar memang murni sebuah universitas Islam dan sangat bangga akan sejarahnya yang panjang. Universitas ini tidak mau menggabungkan unsur-unsur pendidikan modern Barat dalam program pengajarannya. Sebaliknya, dengan bangga universitas ini memberikan pokok-pokok pengajaran

²⁹*Ibid.*, h. 93.

klasik, seperti yang telah diajarkan selama berabad-abad lamanya dengan memprioritaskan hafalan dibandingkan analisis. Karena Gus Dur mempunyai daya ingat yang kuat maka hal ini tentu saja sangat tidak menarik dan tidak menantang baginya. sehingga membuat Gus Dur mengulang kemalasannya sewaktu masih di kelas pemula, ia hampir tidak pernah masuk mengikuti pelajaran di kelas, ditambah lagi kegiatannya di Kairo semakin padat selain menjabat sebagai ketua perhimpunan mahasiswa ia juga bekerja di kedutaan Indonesia.

Gus Dur merasa telah memperoleh pelajaran yang cukup tanpa harus menempuh pelajaran ditahun pertama. Akan tetapi ternyata ia salah besar. Pertama, pihak universitas yang mengurus beasiswanya tidak begitu suka dengan catatan kehadirannya. Kedua, ia terlalu memandang enteng persiapan yang diperlukan untuk dapat lulus ujian akhir. Dan pada akhirnya, ia gagal lulus di salah satu dari dua subjek inti dan dinyatakan bahwa ia harus mengulang tahun itu tanpa menerima beasiswa.³⁰

Di tengah kegundahan Gus Dur atas kegagalannya di Al-Azhar, dia mendapat kabar baik yang membuatnya keluar dari keterpurukannya. Ia mendapat tawaran beasiswa di Universitas Baghdad. Tawaran ini merupakan kesempatan baik untuk memulai segalanya dari awal.

Universitas Baghdad telah mapan sebagai sebuah Universitas Islam, tetapi tidak seperti Al-Azhar. Pada pertengahan 1960-an, universitas ini mulai berubah menjadi universitas bergaya Eropa. Di universitas ini, para mahasiswa diharapkan untuk berpikir kritis dan banyak membaca. Tugas-tugas mereka juga

³⁰*Ibid.*, h. 99.

harus mencerminkan hal ini. Bagi Gus Dur, ini adalah dorongan intelektual yang sejati dan bukan cara belajar menghafal. Ia pun lebih merasa tertantang, hal ini membuat Gus Dur harus belajar keras dan lebih teratur dari pada sebelumnya.³¹

Pada pertengahan tahun 1966 Gus Dur telah resmi menjadi mahasiswa di Universitas Baghdad. Lingkungan universitas ini terbukti dapat membuat Gus Dur tumbuh subur sebagai seorang cendekiawan. Tetapi sebelum itu, ia harus terlebih dahulu dipaksa melepaskan kebiasaannya lamanya. Pada tahun pertama di Universitas Baghdad Gus Dur berniat mencoba-coba beberapa kelas dan tidak harus hadir secara teratur. Akan tetapi, ia kemudian membatalkan niatnya karena ia mendapat informasi bahwa pihak universitas memantau kehadirannya dan bahkan kehadiran merupakan hal yang wajib. Kegagalannya di Al-Azhar telah memberi efek jera kepadanya.

Ketika Gus Dur telah siap menempuh pelajaran di Baghdad, jadwal belajarnya dibuat lebih padat dan lebih ketat dari sebelumnya. Ia tidak lagi bebas berjalan-jalan di kota. Namun demikian, ia masih mempunyai waktu untuk pergi ke bioskop untuk menonton film-film Prancis. Ia juga masih tetap membaca dengan teratur dan sering kali hal ini dilakukan hingga menjelang pagi.

Rutinitas yang dilakukan Gus Dur di Baghdad bukan hanya itu. Dari pukul 11.00 pagi hingga 14.00, ia bekerja di kantor Ar-Rahmadani. Ar-Rahmadani adalah sebuah perusahaan kecil yang mengkhususkan diri dalam impor tekstil dari Eropa dan Amerika.³² Karena keterampilan Gus Dur dalam menulis dan menerjemahkan maka ia pun dapat terus bekerja di kantor ini hingga

³¹*Ibid.*, h. 103.

³²*Ibid.*, h. 104.

tiga setengah tahun. pada sore harinya, ia sibuk membaca di perpustakaan universitas. Kebanyakan pelajaran yang diikuti di universitas mengharuskannya membuat tugas makalah secara teratur dan sering kali cukup panjang. Biasanya, akan ditentukan berapa buku acuan yang harus di baca untuk menulis satu makalah tersebut. Akibatnya, ia memutuskan untuk berada beberapa jam di perpustakaan untuk membaca agar dapat terus mengikuti pelajaran. Ia juga masih secara teratur menulis esai untuk perpustakaan dan majalah di Indonesia. Selain itu, ia juga masih tetap aktif terlibat dalam kepemimpinan Perhimpunan Pelajar Indonesia.

Selama tiga tahun di Baghdad Gus Dur juga belajar bahasa Prancis di pusat kebudayaan Prancis di kota ini. Sebenarnya, Gus Dur bukanlah termasuk pemula dalam belajar bahasa Prancis. Sebelumnya ia sudah bisa bercakap-cakap dalam bahasa Prancis dengan cukup baik dan juga bisa membaca buku-buku dalam bahasa Prancis. Akan tetapi ia belum pernah belajar bahasa Prancis secara resmi.

Hampir sama dengan Kairo, kota kuno Baghdad sangat terkenal di sepanjang sejarah Islam dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi Gus Dur. Di Baghdad pada khususnya dan Irak pada umumnya, ia dapat menyaksikan sebagian dari makam-makam bersejarah. Bila sedang punya waktu luang, pada akhir pekan biasanya ia memutuskan untuk mengunjungi daerah pemakaman. Bahkan dalam beberapa kesempatan ia berdiam di tempat ini selama satu hari untuk mengerjakan doa.

Pada pertengahan tahun 1970-an, Gus Dur menyelesaikan studi empat tahunnya di Universitas Baghdad dan ia pun kemudian pindah ke Eropa. Mula-

mula ia tinggal di Belanda untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya. Ia berharap dapat memperoleh kesempatan untuk melakukan studi pascasarjana di bidang perbandingan agama. Mula-mula ia mencari informasi mengenai hal ini di Universitas Laiden. Ketika itu, ia berharap akan bisa memperoleh tempat bagi studinya lebih lanjut dan kemudian akan mengajak sang istri Nuriyah tinggal bersamanya di Eropa. Akan tetapi, kekecewaanlah yang diperolehnya karena kemudia ia mendapatkan informasi bahwa di Laiden dan juga seluruh Eropa, studi di Universitas Baghdad hampir tidak memperoleh pengakuan. Universitas-universitas Eropa menetapkan prasyarat yang mengarsukannya untuk mengulangi studi tingkat sarjana.³³

Walaupun Gus Dur tidak memperoleh kualifikasi formal dari studinya di Eropa, namun pengalamannya di Eropa itu adalah cita-cita yang ia inginkan bertahun-tahun sebelumnya. Sejak masih di Yogyakarta Gus Dur telah melakukan studi mengenai pemikiran barat. Di Kairo, ia melanjutkan studinya itu. Begitu juga di Baghdad ketika ia bisa menggali lebih dalam lagi tentang ilmu sosial Barat yang kritis dan pemikiran Barat secara umum. Dengan tinggal di Eropa, ia mempunyai kesempatan untuk mempelajari secara langsung sifat masyarakat di Belanda, Jerman dan Prancis. Ia juga berkesempatan untuk melakukan percakapan dan diskusi mengenai masyarakat dan pemikiran Barat di Eropa.

Gus Dur akhirnya tinggal selama enam bulan di Belanda. Ia menghabiskan banyak waktunya untuk mencari tahu mengenai kesempatan untuk bisa belajar di Laiden dan di universitas-universitas di kota-kota yang berdekatan

³³*Ibid.*, h. 111.

dengan Belanda dan Jerman. Selama waktu itu, ia mencari uang dengan bekerja di tempat binatu milik orang Cina. Di sini ia belajar menggosok dan melipat pakaian dengan sangat efisien. Dari Belanda Ia pindah ke Jerman dan tinggal di sana selama empat bulan dan kemudian ia pindah ke Prancis selama dua bulan. Setelah itu, ia kembali ke Tanah Air.³⁴

Gus Dur kembali ke Jawa pada tanggal 4 Mei 1971. Kegagalannya menempuh pendidikan di Eropa tidak menyurutkan niatnya untuk tetap maju melanjutkan studinya. Ia kemudian mendaftarkan diri di Universitas McGill, Montreal, di Kanada. Tetapi setelah tinggal beberapa lama di Jakarta ia mulai mengubah rencananya. Perhatiannya telah tertuju pada persoalan yang terjadi di Indonesia dan keluarga kecilnya yang baru.

Disamping menjalankan rutinitas barunya, Gus Dur tetap rajin menuangkan ide-idenya dengan menulis berbagai artikel-artikel yang di muat di koran-koran dan majalah-majalah. Kegemarannya pun dalam membaca buku-buku tidak pernah surut bahkan sudah menjadi suatu ritual yang wajib bagi Gus Dur.

C. *Perjalanan Karir K. H. Abdurrahman Wahid*

Sepulang dari pengembalaannya mencari ilmu, ia menetap di Jombang. Setelah beberapa bulan berada di Indonesia ia diundang untuk ikut bergabung dalam kegiatan Lembaga Pengkajian Pengetahuan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES), yang merupakan salah satu dari sejumlah LSM penuh harapan yang lahir pada tahun 1970-an. Yang membuat Gus Dur tertarik dengan LP3ES

³⁴*Ibid.*, h. 112.

karena lembaga ini menunjukkan minat yang besar terhadap dunia pesantren dan juga ada upaya untuk menggabungkannya dengan pengembangan masyarakat.³⁵

Pada tahun 1972, Gus Dur mulai memberikan ceramah dan seminar secara teratur dengan berkeliling Jawa. Ia juga menulis artikel-artikel untuk majalah berita nasional serta jurnal-jurnal. Rutinitasnya ini memungkinkannya untuk mengembangkan pikirannya lebih jauh.

Sekitar tahun 1974, Gus Dur dipercayakan oleh Kiai Sobary untuk mengajar Kaidah Fiqih di Madrasah Aliyah pada Pesantren Jombang. Keberhasilannya dalam mengajar membuatnya kembali diberi tugas untuk mengajar Al-Hikam.³⁶

Prestasi yang ditunjukkan Gus Dur dalam menjalankan profesi membuatnya ditawarkan jabatan sebagai Dekan di Fakultas Ushuluddin pada Universitas Hasyim As'ary di Jombang. Tahun 1977 Gus Dur telah bergabung sebagai tenaga pengajar di universitas ini. Pada perkembangan selanjutnya Gus Dur bukan hanya mengajar di Fakultas Ushuluddin tetapi dia juga mengajar di Fakultas Tarbiyah dan Dakwa.³⁷ Pada saat yang sama, ia juga diberikan tugas mengajar sekali dalam seminggu di Madrasah Tembakberas. Karir Gus Dur terus menanjak dan banjir dengan tawaran dari berbagai pihak.³⁸

³⁵ *Ibid.*, h. 114-115.

³⁶ *Ibid.*, h. 121-122.

³⁷ *Ibid.*, h. 123.

³⁸ *Ibid.*, h. 124.

Sekitar tahun 1980-an, Gus Dur bergabung masuk ke NU dan menjadi anggota Dewan Syuriah selama beberapa tahun. Di samping itu, pada tahun 1982-1985 Gus Dur terpilih menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta³⁹ yang membuatnya harus menjalankan dua peran dalam kurung waktu yang sama yakni sebagai seorang kiai dan budayawan. Namun hal tersebut bukanlah suatu kendala baginya, bahkan perjalanan karirnya di NU terus naik hingga akhirnya ia bisa terpilih menjadi ketua PBNU. Beberapa tahun berselang, ia kemudian terjun ke dunia politik dengan menunggangi partai PKB, yang pada akhirnya berhasil mengantarkannya menduduki kursi kepresidenan.



³⁹Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), "Gus Dur di antara Seniman," *Situs Resmi DKJ*. <http://www.dkj.or.id/articles/sastra/gus-dur-di-antara-seniman> (07 juli 2013).

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK K.H. ABDURRAHMAN WAHID

Abdurrahman Wahid sejak tahun 1980-an, merupakan tokoh yang paling populer di kalangan NU pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dan bahkan di dunia internasional karena pertumbuhan dan perkembangan pemikirannya yang unik dan sering kontroversial. Pemikiran politik Gus Dur mulai berkembang pada awal 1980-an, hal ini bukan hanya diperoleh dari hasil bacaannya tentang ilmu politiknya yang cukup luas, melainkan juga pergaulannya yang baik dan fleksibel dengan berbagai kalangan pejabat negara maupun para aktivis pergerakan.

Akar pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid sesungguhnya didasarkan pada komitmen kemanusiaan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Gus Dur, komitmen kemanusiaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tuntutan persoalan utama dalam kiprah politik umat Islam pada masyarakat modern dan pluralistik seperti di Indonesia. Komitmen kemanusiaan itu pada intinya adalah menghargai sikap toleransi dan memiliki kepedulian yang kuat terhadap keharmonisan sosial (*sosial harmony*). Menurut Gus Dur, kedua elemen asasi tersebut dapat menjadi dasar ideal untuk menciptakan politik komunitas Islam di Indonesia.¹

Modus politik yang secara konsisten diperjuangkan oleh Gus Dur adalah komitmen terhadap sebuah tatanan politik nasional yang tidak sekaligus mengangkat universalitas kemanusiaan. Platform kehidupan umat Islam seharusnya diletakkan pada tiga prinsip persaudaraan yaitu *ukhuwah Islamiyah*, *ukhuwah wathoniyah*, dan *ukhuwah basyariah*, sebagaimana prinsip NU. Karena itu dalam politik, Gus Dur

¹Ali Mansyur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 87.

selalu menghindari formalitas Islam dalam negara. Segala bentuk eksklusivisme, sektarianisme dan privilese-privilese politik harus dijaui, termasuk upaya pemberlakuan ajaran agama melalui negara dan hukum formal. Ide proposionalitas dalam perwakilan di lembaga negara, menurut Gus Dur juga harus dihindari karena tuntutan-tuntutan ini jelas berlawanan dengan asas kesejahteraan (egalitarianisme) bagi warga negara.²

A. *Islam dan Negara*

Salah satu persoalan krusial yang telah cukup lama memancing debat dan kontroversi baik di dalam literatur-literatur pemikiran keislaman itu sendiri maupun dalam kajian politik adalah tentang hubungan antara agama dan politik. Dalam isu politik Islam Indonesia terdapat dua kelompok yang saling bersebrangan, walaupun dalam kenyataannya nanti akan berkembang varian-varian yang beragam dan seringkali berlawanan. Dua kelompok itu adalah kelompok simbolik dan kelompok substantif. Kalangan Islam politik simbolik meyakini bahwa Islam harus diwujudkan secara simbolik dalam politik dengan melegalformalkan Islam sebagai sebuah negara. Golongan ini berpendapat bahwa Islam adalah agama yang integratif, Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara, antara dunia dan akhirat serta pemisahan dalam bentuk apapun. Sedangkan kelompok substantif adalah golongan yang menolak seluruh bentuk perjuangan yang hendak melegalformalkan Islam dalam politik. Bagi kelompok ini, usaha simbolisasi syariat akan mengancam integrasi dan sekaligus mencemarkan makna hakiki agama. Pencampuran antara agama dan politik,

²*Ibid.*, h. 88.

merupakan kekeliruan karena agama hanya akan dijadikan alat untuk meraih kepentingan politik kaum elit.³

Para intelektual muslim mencoba mengamati dan mengkaji persoalan semacam ini dengan perspektif keislaman mereka masing-masing. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu intelektual muslim yang juga terus berupaya mencari pijakan-pijakan teologis tentang bagaimana sesungguhnya Islam bisa “dibumikan” sebagai ajaran moral yang mampu melakukan perubahan dalam dinamika perpolitikan.

Berdasarkan hasil pencariannya berpuluh-puluh tahun tentang bagaimana sesungguhnya konsep permanen Negara Islam itu berbentuk. Sampai usia di penghujung mautnya dia bertutur tetap tidak menemukannya.⁴ Dalam catatan sejarah bentuk pemerintahan yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat terus menerus mengalami perubahan seiring bergantinya pemimpin. Keadaan itu, menurut Gus Dur menandakan bahwa Islam memang tidak memiliki konsep yang jelas karena jika ada konsepsi yang jelas maka tidak akan demikian adanya. Sehingga secara tegas Gus Dur menyuarakan bahwa Negara Islam tidak dikenal dalam Islam.⁵

Sampai akhir hayatnya Gus Dur sangat konsisten terhadap ketidaksetujuannya pada formalisme Islam untuk melahirkan suatu negara dan sistem pemerintahan Islam, terutama di negara Indonesia yang sangat heterogen. Dalam

³Supriyadi, “Peran Politik Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa” (*Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008*), h. 27.

⁴Cecep Hidayat, “Terorisme, Islam, dan Gus Dur,” *Blog Abdurrahman Wahid*. http://www.gusdur.net/opini/Detail/?id=227/hl=id/Terorisme_Islam_Dan_Gus_Dur (17 Juli 2013).

⁵Ali Masykur Musa, *op. cit.*, h. 94.

konsep pembentukan negara, ia justru setuju dengan konsep Ibnu Khaldun ketika pemikir ini berpendapat bahwa:

Agama saja tidak cukup untuk dapat membentuk suatu negara. pembentukan negara, di samping paham keagamaan juga diperlukan rasa *ashabiyah* (perasaan keterikatan). Tujuannya, membentuk ikatan sosial kemasyarakatan.⁶

Ada dua hal yang ditawarkan Gus Dur dalam menetralisasi ketegangan kedua pihak tersebut. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Kedua*, mengembangkan Islam sesuai dengan konteks setempat atau yang biasa dikenal pribumisasi Islam. Dan kedua tawaran itu kemudian mengarah pada penempatan Islam sebagai faktor komplementer dalam kehidupan sosio-kultural dan politik di Indonesia.⁷

Gus Dur menegaskan bahwa Islam bertugas melestarikan sejumlah nilai dan perilaku sosial yang mengaitkan pencapaian tujuan dengan kemuliaan cara yang digunakan. Oleh sebab itu, menurutnya selama tujuan masih tetap, maka cara penyampaian menjadi masalah sekunder. Jelaslah dengan demikian, Islam berfungsi sebagai etika sosial yang memandu jalannya kehidupan bernegara bukan sebagai bentuk kenegaraan tertentu. Pendapat Gus Dur tersebut menunjukkan konsistensinya dalam memperjuangkan demokrasi dan semangat pluralisme di negeri ini.

Dalam pandangan Gus Dur, tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk mendirikan sebuah negara Islam. Tetapi, ada perintah dalam *Al-Quran* untuk membentuk suatu masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai keutamaan yang

⁶*Ibid.*, h. 95.

⁷Abdul Qadir Shaleh, "Pemikiran Gus Dur tentang Relasi Islam dan Negara," *Blog Baca Ilmu Online*. <http://bacailmuonline.blogspot.com/2012/06/pemikiran-gus-dur-tentang-relasi-islam.html> (28 Juni 2013).

menjalankan *amar ma'ruf* (membangun kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah keburukan), untuk menegakkan iman dan keadilan di muka bumi. Karena itu, Islam tidak boleh direduksi menjadi suatu negara melainkan dikembalikan sebagai agama.⁸

Bahkan lebih jauh Gus Dur menyatakan bahwa para pemikir politik dalam Islam, dengan merujuk pada pandangan Munawir Syadzali, mereka bukan mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang Islami melainkan justru menekankan penggunaan bentuk kenegaraan yang sudah ada. Selama kaum muslim dapat menyelenggarakan kehidupan beragama mereka secara penuh, maka konteks pemerintahannya tidak lagi menjadi pusat pemikiran. Atas dasar kerangka berpikir inilah maka Gus Dur dengan mengantongi persetujuan ulama dari organisasi yang dipimpinnya secara sadar menerima Asas Tunggal Pancasila. Gus Dur sendiri berpendapat bahwa pemerintahan yang berideologi Pancasila termasuk negara damai yang harus dipertahankan.⁹

Apabila Islam dijadikan ideologi negara, berarti akan membuka peluang intervensi negara terhadap agama dan politisasi agama, padahal ajaran-ajaran agama itu sendiri bersifat privat, yang berjalan di kalangan masyarakat melalui persuasif, bukan melalui perundan-undangan negara yang bersifat kohesif. Selanjutnya, Gus Dur menyatakan bahwa agama merupakan dimensi privat yang paling independen dari manusia dan tidak boleh diintervensi oleh negara yang bersifat publik.¹⁰

⁸Supriyadi, *op. cit.*, h. 28.

⁹*Ibid.*, h. 29.

¹⁰Abdul Qadir Shaleh, *loc. cit.*

B. Demokrasi

Menurut Gus Dur demokrasi adalah keadaan tertentu yang memiliki beberapa ciri, antara lain harus bertumpuh pada kedaulatan hukum dan memberikan perlakuan yang sama pada semua warga negara di hadapan undang-undang. Dengan adanya demokrasi, masing-masing komunitas memiliki kemerdekaan berbicara, kebebasan berpikir dan harus memiliki sikap menghormati pluralitas pandangan. Lebih jauh lagi, ia berarti keharusan memelihara dan melindungi hak-hak pihak minoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi semua hal itu mengacu kepada kepentingan umum yaitu kepentingan bersama sebagai bangsa dan negara.¹¹

Ciri di atas mengesankan bahwa negara yang demokrasi hanya bisa berjalan jika pilar-pilar yang menjadi landasan terciptanya terpenuhi dengan baik. Adapun beberapa pilar yang menjadi landasan demokrasi menurut pandangan Gus Dur, antara lain:

1. Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum merupakan hal yang perlu diperjuangkan dalam menegakkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa kedaulatan hukum yang dimaksud adalah pemberlakuan hukum yang sama terhadap semua elemen masyarakat. Para penegak hukum harus tegas memegang komitmen bahwa di hadapan hukum semua sama, inilah yang kemudian menjadi pengawas terhadap para oknum yang hendak melakukan pelanggaran seperti korupsi, manipulasi dan pelanggaran hukum lainnya. Sehingga dapat tercipta rasa aman dan damai pada setiap warga masyarakat.

¹¹Supriyadi, *op. cit.*, h. 30.

Tegaknya suatu hukum dalam suatu negara baru bisa tercipta bila semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi. Olehnya itu, masyarakat juga harus mengetahui fungsi utama hukum yakni menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul ditengah masyarakat¹², dan efek dari pelanggaran hukum harus bisa menciptakan rasa takut akan hukuman jika pelanggaran dilakukan. Para penegak hukum seperti petugas keamanan dan peradilan pun juga harus bersikap tegas dan adil dalam menyikapi berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat. Jika semua hal ini dapat terwujud maka baru dapat dikatakan kedaulatan hukum telah berjalan dengan semestinya.

2. Penegakan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang di bawah sejak lahir secara kodrati yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).¹³ Oleh karena itu, harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Komitmen Gus Dur dalam upaya membangun demokrasi pada ranah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak diragukan lagi. Ini terbukti dari rentetan pembelaannya terhadap minoritas yang termarginalkan baik oleh negara maupun oleh masyarakat sekalipun. Contohnya saja, pembelaannya

¹²Agnane Mahardika Putri, "Tugas, Fungsi dan Tujuan Hukum," *Blog Agnane Mahardika Putri*. <http://thatsmekrs.wordpress.com/2010/06/17/tugas-fungsi-dan-tujuan-hukum/> (16 Juli 2013).

¹³Achmad Iqbal Ashrye, "Pengertian HAM Menurut Para Ahli," *Blog Pelajaranku*. <http://disini-tempat-pr-ku.blogspot.com/2012/10/pengertian-ham-menurut-para-ahli.html> (16 Juli 2013).

terhadap Arwendo dalam kasus *monitor*, dukungannya terhadap agama Kong Hu Cu agar dimasukkan sebagai agama resmi negara, pendirian Forum Demokrasi (Fordem), pembelaannya terhadap Inul Daratista, serta pembelaannya terhadap Jamaah Ahmadiyah merupakan contoh nyata kepeduliannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Gus Dur harus ada penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang telah melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan. Olehnya itu, perlu ada ruang yang longgar atas kebebasan bertindak dan berpikir bagi setiap orang sesuai dengan kualitas nilai kemanusiaannya.

Komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seolah menjadi komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baginya penegakan nilai kemanusiaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Tanpa nilai tersebut, dunia hanya dipenuhi oleh berbagai bentuk kekerasan dan konflik sosial.

3. Penghargaan Terhadap Pluralisme

Di samping itu, dalam kehidupan yang demokratis perlu adanya kesadaran tentang pentingnya pluralisme yang di dasarkan pada pandangan bahwa manusia lahir dan hadir dalam suatu tatanan dunia yang disebut dengan “Negara” dalam kondisi yang berbeda-beda, baik itu beda suku, budaya, agama, maupun warna kulit. Hanya saja dalam wacana pluralisme, perbedaan antara komunitas tersebut bukan untuk saling merugikan, melainkan agar perbedaan tersebut bisa menjadi potensi untuk merealisasikan kebajikan. Kenyataan akan adanya perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan golongan

tersebut justru harus dikemas dalam bingkai saling menghormati, menghargai, dan saling menolong guna terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera.

Hal ini juga sejalan dengan pandangan Gus Dur tentang pluralisme, sebagaimana yang dilontarkannya dalam buku *Demokrasi Aja Kok Repot*. Pluralisme yang dipahami Gus Dur bukan merubah mawar untuk menjadi melati tetapi menjaga dan memelihara mawar, melati, kenanga dan kamboja agar bisa tumbuh dan berkembang sebanyak-banyaknya. Hak-hak mawar untuk tumbuh itu sama dengan hak melati untuk tumbuh, agar semuanya bisa tumbuh berdampingan secara harmonis sehingga dapat menghasilkan taman yang indah. Tuhan sendiri sudah mentakdirkan kehidupan ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar dapat saling mengenal. Konsep *ta'aruf* antar suku dan bangsa inilah yang dianggap landasan pluralisme yang dipahami oleh Gus Dur.¹⁴ Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁵

¹⁴Nur Kholisoh, *Demokrasi Aja Kok Repot: Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia* (Cet. 1; Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012), h. 152.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007), h. 517.

Pluralisme yang berasal dari bahasa Latin *plus* atau *pluralis* yang berarti tambah, lebih, atau jamak. Artinya, pluralisme merupakan suatu kondisi dimana berbagai corak dan warna terhimpun dengan segala perbedaan yang ada. Kondisi perbedaan yang ada ini tidak serta merta dilebur menjadi suatu corak baru, melainkan justru dibiarkan tumbuh dan berkembang untuk memperkaya dinamika yang ada.¹⁶

Menurut Gus Dur, umat Islam Indonesia sebagai rakyat yang beragama Islam, sebetulnya sudah lama hidup dalam tradisi yang sejalan dengan nilai-nilai pluralisme. Tapi para pemimpinnya tidak bisa menangkap isyarat itu, sehingga yang dilakukan justru membuat isu yang berwawasan sempit, tidak melebarkan wawasan umat Islam. Karena itu wajar jika sementara orang menyatakan bahwa pertumbuhan Islam kini menuju kepada “kelompok” yang sektarian. Menjadi sesuatu yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Isu semacam pri dan nonpri maupun kristenisasi, sebenarnya muncul dari semangat sektarianisme. Padahal mereka hidup dalam pluralisme. Pluralisme akan terjaga jika ada demokrasi. Bangsa ini akan kaya dan kuat karena menjaga jiwa pluralisme.¹⁷

4. Pemberdayaan Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Menurut Gus Dur *civil society* sebenarnya telah terbentuk dikalangan masyarakat Indonesia yaitu dengan lahirnya paguyuban-paguyuban yang ada di tengah-tengah masyarakat. Khususnya dikalangan umat Islam seperti Muhammadiyah, Syariat Islam, NU dan berbagai pergerakan Islam ditingkat

¹⁶*Ibid.*, h. 59.

¹⁷Supriyadi, *op. cit.*, h. 33.

lokal, itu adalah bentuk *civil society* yang memperkuat posisi rakyat terhadap negara sehingga akan tercipta keseimbangan antara negara dan masyarakat (*civil society*). Dalam pandangan Gus Dur posisi imbang itu yang dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalagunaan wewenang. Dalam pengertian demikian, *civil society* mempunyai relasi yang saling melengkapi dengan demokrasi. Sebab *civil society* hanya bisa berkembang dalam iklim negara yang demokratis.¹⁸

Selain itu, menurut Gus Dur demokrasi juga mensyaratkan beberapa hal, yaitu *pertama* rasa tanggung jawab pada kepentingan bersama, *kedua* kemampuan menilik masa depan, dan *ketiga* kesediaan berkorban bagi masa depan. Dan ini semua menurut Gus Dur membutuhkan adanya kerelaan, dan keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa harus diberi imbalan karena “kerelaan” inilah sebenarnya hakikat dari demokrasi. Jadi demokrasi adalah sesuatu yang dilakukan dengan rela.¹⁹

Dengan demikian, bagi Gus Dur bentuk negara Indonesia yang demokratis dengan berasaskan Pancasila adalah suatu bentuk negara yang final. Karena ideologi Pancasila sejalan dengan nilai-nilai universalisme Islam dengan memberikan lima jaminan dasar bagi semua masyarakat Indonesia, baik perorangan maupun kelompok.

¹⁸*Ibid.*, h. 36.

¹⁹Sanjaya Yasin, “Biografi Gus Dur, Profil Abdurrahman Wahid,” *Blog Pendidikan Indonesia*. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/biografi-gus-dur-profil-abdurrahman.html> (01 Juli 2013).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa visi terakhir dari Gus Dur tentang Indonesia di masa depan adalah terciptanya negara Indonesia yang demokratis, pluralis, toleran dan humanis yakni negara yang menjamin kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara dari berbagai latar belakang agama, etnis, gender, aliran, bahasa dan status sosial. Seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tidak ada diskriminasi dan kekerasan dalam kehidupan mereka.



BAB IV

PERANAN K. H. ABDURRAHMAN WAHID DALAM KANCAH PERPOLITIKAN DI INDONESIA

A. Peranan K.H. Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Ketua PBNU

1. Perjalanan K.H. Abdurrahman Wahid Selama Menjabat Sebagai Ketua PBNU.

Masa pemerintahan Gus Dur yang berlangsung selama tiga periode memang membawa angin segar bagi NU. Kebebasan berfikir dan bersuara bagi semua warga NU membuat organisasi ini dapat kembali bangkit dari keterpurukannya. Ini terlihat dengan banyaknya bermunculan organisasi non-pemerintahan (ornop) yang otonom di lingkungan masyarakat NU. Namun dari sisi lain, Gus Dur juga tidak dapat dikatakan berhasil dalam mengelola sepenuhnya organisasi ini. Hal ini terlihat ketika ia menjadi ketua umum PBNU pada Desember 1984, ia memang mewarisi suatu organisasi yang terpecah belah dan kedodoran. Keadaan organisasi ini sedemikian buruk sehingga seorang manajer yang paling cakap pun akan mengalami kesulitan untuk membereskan administrasi organisasi. Gus Dur bukanlah seorang manajer yang cakap dan bahkan setelah lima tahun terlewatkan, ia hampir tidak melakukan apa-apa terhadap struktur organisasi NU. Oleh karena itu, menjelang Muktamar NU 1989, tidaklah jelas sama sekali apakah ia akan terpilih kembali atau tidak.

Namun pada periode pertamanya hal ini masih bisa ditolerir oleh para warga NU dan masih memberikan kepercayaan kepada Gus Dur untuk tetap menempati posisi sebagai ketua PBNU pada periode kedua, karena melihat

prestasinya yang lain. Pada periode kedua kepemimpinannya, sepak terjang Gus Dur makin menampakkan dirinya sebagai sosok yang kontroversial. Sikapnya yang ceroboh dalam memberikan komentar mengenai masalah-masalah sosial dan politik seperti pernyataan Gus Dur yang mengganti sapaan *Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu* dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan sebagainya¹, serta pembelaannya terhadap Arswendo dalam kasus *monitoring*, menurut Gus Dur memang tolol dan salah dengan mengadakan jejak pendapat mengenai orang yang paling penting yang pernah hidup di dunia ini, tetapi tanggapan atau respon masyarakat yang menempatkan Soeharto pada urutan pertama dan Nabi Muhammad pada urutan ke-11 bukanlah merupakan sepenuhnya kesalahannya oleh karena itu seharusnya ia tidak ditangkap dan dipenjarakan melainkan cukup dengan memboikot tabloidnya.² Masih banyak lagi komentar Gus Dur yang menjadi pertikaian dan telah membuat jengkel banyak pihak dalam NU dan bahkan membuat mereka menjauhkan diri dari Gus Dur. Bahkan sikapnya ini tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri tetapi juga berdampak negatif terhadap NU, NU yang awalnya mendapatkan dukungan penuh dari Soeharto sekarang telah berbalik menjadi lawan bagi Soeharto karena berbagai kritikan pedas yang dilontarkan Gus Dur kepada resim yang berkuasa. Hal ini membuat Soeharto mengatur cara untuk menarik simpati para agamawan dengan mendirikan ICMI pada bulan

¹Achmad Mufid AR, *Ada Apa Dengan Gus Dur* (Cet. 1; Yogyakarta: Kutub, 2005), h. 151-158.

²Greg Barton, *Biografi Gus Dur: the authorized biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* (Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012), h. 220.

Desember 1990. ICMI digunakan Soeharto untuk menyeimbangi NU karena menurutnya Gus Dur telah menjadi lawan politiknya. Namun Gus Dur tidak tinggal diam, ia kemudian membentuk Forum Demokrasi (Fordem) 1991 sebagai lawan dari ICMI.³

Soeharto secara terus menerus melakukan tekanan terhadap Gus Dur dan NU. Ini terlihat ketika Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Gus Dur merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut dengan memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus yang berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu tetap berlangsung dan dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran.⁴ Semakin kuat usaha Soeharto untuk menekan Gus Dur semakin kuat pula perlawanan yang ditunjukkan Gus Dur.

Usaha Soeharto tidak hanya sampai di situ, bank Summa yang merupakan donator bagi banyak usaha NU terpaksa ditutup karena ada kesalahan manajemen di kantor pusat dan pada bulan April 1993 saham bank ini dibeli oleh suatu badan keuangan yang berada di belakang surat kabar surabaya, *Jawa Pos*. Akibatnya, proyek-proyek termasuk pabrik nanas, pabrik tapioka dan pembudidayaan ikan air tawar serta bank kreditan

³*Ibid.*, h. 222-225.

⁴*Ibid.*, h. 227-228.

mengalami kemerosotan karena kehilangan donaturnya. Semua ini merupakan usaha Soeharto untuk menumbangkan Gus Dur.⁵

Setelah masa jabatannya di periode kedua hampir berakhir, terlintas dipikiran Gus Dur untuk mundur dan tidak mencalonkan diri di periode berikutnya karena khawatir NU semakin mendapat tekanan dari rezim Soeharto. Namun kekawatirannya akan ditungganginya NU oleh politik membuatnya merubah keputusannya. Ketika tinggal beberapa minggu sebelum muktamar NU dilaksanakan pada bulan November Gus Dur mengumumkan bahwa dia berubah pikiran dan berkeinginan untuk ikut serta dalam pemilihan ketua umum PBNU.

Gus Dur muncul sebagai pemenang, walaupun nyaris gagal dalam muktamar NU bulan November 1994, kendati pun rezim Soeharto dengan segala cara menentang pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua umum PBNU. Gus Dur pun menyatakan bahwa ia telah memenangkan pertarungan atas uang, fitnah, dan intimidasi. Gus Dur telah mencapai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam masa Orde Baru Soeharto. Gus Dur menentang kekuatan penuh Soeharto dan rezimnya dan ia berhasil menang walaupun Soeharto telah berusaha sekuat tenaga untuk menggagalkannya.

Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya yang memiliki popularitas besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Gus Dur menasehati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998.

⁵*Ibid.*, h. 247-248.

Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI, Soerjadi yang bekerjasama dengan pemerintah.⁶

Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Gus Dur dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU, selanjutnya beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia jatuh sakit pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Gus Dur melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk

⁶Aswaja, "K. H. Abdurrahman Wahid," *Situs Resmi Wiki Aswaja NU*. http://wiki.aswajanu.com/KH_Abdurrahman_Wahid (01 Juli 2013).

bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disetujui oleh Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto membuktikannya dengan mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wakil Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.⁷

2. Peran K.H. Abdurrahman Wahid Selama Menjabat Sebagai Ketua Umum PBNU

Selama 3 periode, Gus Dur memegang jabatan sebagai ketua PBNU, pasang surut dukungan telah dirasakannya akibat berbagai persoalan yang terjadi baik itu persoalan dari tubuh NU sendiri maupun persoalan lain dari luar seperti tekanan dari pihak rezim yang berkuasa. Namun dibalik semua persoalan tersebut Gus Dur tetap memainkan peran penting sebagai ketua umum PBNU. Berikut, penulis mengklasifikasikan peran yang dilakukan oleh Gus Dur selama menjabat sebagai ketua umum PBNU:

- a. Pemurnian NU Sebagai Organisasi Agama dan Pengakuan terhadap Pancasila.

Naiknya pasangan Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq menjadi pimpinan nasional NU pada munas tahun 1983 dan muktamar 1984 disambut hangat oleh masyarakat NU. Menurut banyak kalangan di NU hadirnya dua pemimpin ini membawa pembaharuan dalam tubuh NU. Dimana sebelumnya, NU yang dipimpin oleh Idham Chalid telah

⁷*Ibid.*

kehilangan identitasnya sebagai organisasi keagamaan dan lebih menonjolkan aktivitas politiknya dalam PPP. Dan hampir tidak ada usaha untuk meredam erosi kepentingan politik NU dalam PPP. Hal ini membuat banyak ulama NU geram dengan Idham Chalid dan lebih memilih para pemimpin baru seperti Gus Dur dan Kiai Achmad Siddiq.

Gus Dur melihat bahwa penting bagi NU untuk memisahkan diri dari PPP karena dua alasan yang saling berhubungan: *pertama*, ia merasa bahwa perlakuan yang diterima oleh NU dari rezim yang berkuasa sangat tidak adil seperti yang terlihat dari apa yang terjadi dalam PPP dan adanya tekad pemerintah untuk menghalangi semua pembangkangan politik. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bagi NU untuk tetap tinggal dalam PPP. Menurut Gus Dur, lebih baik bagi NU untuk memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat (*civil society*). *Kedua*, Gus Dur yakin bahwa tidak sehat apabila perhimpunan agama mempunyai hubungan langsung dengan partai politik. Hal ini bukan disebabkan karena Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan politik tetapi keterlibatan langsung badan-badan keagamaan dalam politik partai akan membatasi kebebasan beragama para anggotanya dan mendorong munculnya sekterianisme dalam politik.⁸

Oleh karena itu, munas tahun 1983 dan muktamar tahun 1984 yang telah mengangkat Gus Dur sebagai ketua PBNU juga menghasilkan keputusan bahwa pejabat-pejabat NU tidak lagi diizinkan untuk merangkap jabatan di partai-partai politik dan menerima Pancasila

⁸Greg Barton, *op. cit.*, h. 175-176.

sebagai asas tunggal. Keputusan ini secara tidak langsung menguntungkan rezim yang berkuasa, sehingga rezim Soeharto menyambut baik kepengurusan NU yang baru.⁹ Keputusan ini juga berhasil menghentikan perdebatan yang semakin meruncing tentang negara dan agama.

Berfokusnya kembali NU terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan membaiknya hubungan NU dengan rezim yang berkuasa membawa dampak yang sangat baik bagi NU. Selain dapat dengan bebas menjalankan berbagai kegiatan kemasyarakatan NU juga dapat bekerjasama dengan berbagai departemen-departemen seperti Departemen Agama. Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap NU telah pulih kembali setelah sekian lama hilang. Basis massa NU pun telah meningkat dari sebelumnya yang sempat mengalami kemerosotan.

b. Pelopor Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada Periode kedua dimasa pemerintahan Gus Dur, telah berhasil dibuka cabang bank perkreditan rakyat dan sebuah cabang bank di Sidoarjo. Selama beberapa tahun Gus Dur telah mengimpikan adanya suatu jaringan bank pedesaan seperti yang ada di Bangladesh dengan Grameen Bank. Jaringan bank pedesaan ini akan memberikan kredit kepada mereka yang sukar memperoleh kredit dari bank konvensional. Bank ini didukung oleh bank Summa, yang dimiliki oleh WNI keturunan Cina. Dukungan ini bukan diperoleh secara kebetulan tetapi ini merupakan hasil usaha Gus Dur yang secara konsisten membela WNI

⁹*Ibid.*, h. 178-179.

keturunan Cina dan orang-orang kristen Indonesia, baik protestan maupun khatolik. Hasilnya, banyak dari WNI keturunan Cina yang bersedia mendukung inisiatifnya.¹⁰

c. Perintis Forum Demokrasi

Setelah didirikannya ICMI oleh presiden Soeharto pada bulan Desember 1990, Gus Dur dan sejumlah teman-teman yang sepaham dengannya merasa prihatin dengan terus meningkatnya sektarianisme atau politik aliran. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membentuk suatu organisasi untuk membela pluralisme dan demokrasi. Pada awal tahun 1991, 40 intelektual yang berasal dari berbagai kelompok agama dan masyarakat di Indonesia mendirikan Forum Demokrasi. Gus Dur terpilih menjadi ketua dan juru bicara forum ini. Ketenaran dan pengaruh Gus Dur akan membuat organisasi baru ini mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu juga karena Gus Dur sukar dibungkam oleh rezim yang berkuasa sebab ia mempunyai basis massa yang luas di NU.¹¹

Para intelektual yang bergabung dalam Forum Demokrasi dengan hati-hati menunjukkan bahwa mereka bukanlah berkampanye atas dasar partai politik dan bahkan mereka juga tidak berharap akan dapat secara langsung mempengaruhi proses politik. Forum Demokrasi ini didirikan untuk memberikan kekuatan pengimbang terhadap lembaga-lembaga seperti ICMI yang mendorong tumbuhnya pemikiran sektarianisme.

¹⁰*Ibid.*, h. 213.

¹¹*Ibid.*, h. 224-227.

Bahkan dalam perkebangannya forum ini banyak mengkritik kebijakan rezim yang berkuasa.

B. Peranan K.H. Abdurrahman Wahid dalam Mendirikan dan Membesarkan PKB (*Partai Kebangkitan Bangsa*)

1. Sejarah Lahirnya PKB

Setelah lebih dari tiga dasawarsa lamanya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Sebuah pemerintahan yang berjalan dengan melaksanakan tatanan kehidupan kenegaraan dimana negara memiliki dominasi peran yang sangat kuat dan mampu mensubordinatkan kekuatan rakyat dan berbagai macam elemen yang ada di dalamnya begitu pun dengan partai politik. Akhirnya jatuh tepat pada tanggal 21 Mei 1998 atas desakan kuat arus reformasi.

Arus reformasi yang begitu kuat dan berhasil mendesak mundur Presiden Soeharto dari kursi kekuasaannya adalah merupakan titik terang terciptanya negara Indonesia yang lebih demokratis. Terbukanya keran demokrasi yang telah lama mandek, kebebasan masyarakat yang telah lama tertutup rapat dan pulihnya bangunan *civil Society* yang telah luluh lantah adalah merupakan harapan dan cita-cita segenap rakyat Indonesia yang telah lama terkubur. Dengan runtuhnya kekuatan otoritas Soeharto maka terbukalah keran demokrasi dan kebebasan, termasuk kebebasan dalam membentuk partai politik. Maka pada saat yang hampir bersamaan lahirlah puluhan partai politik baru dengan *platform* yang berbeda-beda, sebagai bentuk ekspresi politik rakyat Indonesia yang muncul bagai jamur di musim hujan.

Salah satu organisasi Islam terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama (NU) yang telah lama mengubur hasrat politiknya sejak Mukthamar NU yang ke-27 di Situbondo yang menyatakan tidak lagi terikat secara organisatoris dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis, kembali tergerak nafsu politiknya untuk ikut serta ambil bagian dalam memperbaiki bangsa yang telah lama terpuruk dalam kubangan politik Orde Baru selama hampir 32 tahun lamanya.¹²

Munculnya kembali gairah euforia politik warga NU ini tentu bukan sekedar ingin ikut-ikutan. Secara internal organisasi, keinginan warga NU tersebut pada umumnya didasari oleh tiga hal. *Pertama*, bermotif dakwah dalam rangkai pengamalan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang sudah lama menjadi doktrin ajaran politik NU. *Kedua*, potensi sosiologis dan historis dimana solidaritas dan emosionalitas ke-NU-an yang sangat potensial untuk menjadi kekuatan politik. *Ketiga*, dalam sejarah peran politik warga NU selama hampir tiga dasawarsa termarginalisasi dalam politik dan seolah tidak habis-habisnya mendapat perlakuan yang tidak adil, baik dari negara maupun dari kelompok Islam lainnya.¹³

Di samping itu, mayoritas warga NU mulai merasakan perlunya identitas politik yang akan menjadi simbolisasi bagi perjuangan di level kekuasaan. Setelah sekian lama, terutama setelah melakukan fusi dengan Majelis Syura Muslim Indonesia (Mayumi) pada tahun 1945 serta berfusi

14. ¹²Koirudin, *Menuju Partai Advokasi* (Cet. 5; Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005), h.

¹³*Ibid.*, h. 2-3.

dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada orde baru, warga NU menjadi ter subordinasi oleh kekuatan politik partai induk.¹⁴

Kini setelah kekuasaan rezim Soeharto tumbang dan gerakan reformasi diluncurkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai dibanjiri usula-usulan dari warga NU dari seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam dan usulan yang paling sentral terdengar adalah keinginan warga NU untuk segera mendirikan partai politik sendiri sebagai wadah aspirasi politik masyarakat *Nahdhiyyin*. Keseriusan masyarakat NU untuk terlibat secara politik praktis ini dibuktikan dengan banyaknya usulan yang masuk ke kantong PBNU, ada yang mengusulkan visi dan Misi Parpol, AD/ART Parpol, nama Parpol bahkan dan bahkan sampai nama-nama pengurus Parpol.¹⁵

Mulanya, Gus Dur kurang setuju dengan usulan ini dan bahkan merasa prihatin atas keinginan warga NU yang ingin mendirikan Parpol karena hal ini berarti akan mencederai komitmen dan perjuangan pada muktamar di Situbondo tahun 1984. Namun menjelang bulan Juli 1998, sikapnya mulai mengendur karena tampaknya hampir pasti akan ada semacam partai NU, dengan atau tanpa restunya. Jika NU ingin memberikan kontribusi yang serius pada perpolitikan negeri ini, maka hal itu harus disalurkan lewat satu partai yang berbasiskan keanggotaan NU yang luas.¹⁶

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, h. 12.

¹⁶Greg Barton, *op. cit.*, h. 328.

Sepanjang bulan Juni, Gus Dur masih saja tidak yakin mengenai arah yang harus ditempuhnya. Akan tetapi, ia merasa sangat khawatir bahwa dalam kekosongan kekuasaan setelah masa Soeharto, Golkar mempunyai posisi baik untuk melakukan konsolidasi dan melaksanakan kampanye pemilu secara profesional. Tidak menutup kemungkinan Golkar akan keluar sebagai pemenang, apalagi jika PPP bersedia untuk membentuk koalisi dengan Golkar. Secara bersama-sama, kedua partai besar ini mungkin bisa mengumpulkan cukup suara yang diperlukan untuk membentuk suatu pemerintahan. Terlebih lagi jika sebagian dari banyak partai Islam yang baru juga ikut bergabung.¹⁷

Dari rasa khawatir Gus Dur itulah dan juga disertai dengan kerasnya arus yang menginginkan terbentuknya Parpol, maka pada akhirnya PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998, yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima ini diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/ Koordinator Harian PBNU) dengan beranggotakan K.H. M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H. M. Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekertaris jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima ini dibekali Surat Keputusan PBNU.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, h. 329.

¹⁸ Koirudin, *op. cit.*, h. 15.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima dalam mewujudkan keinginan warga NU untuk membentuk partai politik sendiri, maka dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H. Abdul Aziz, M.A., Drs. H. Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensibertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk partai baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan Parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.¹⁹

Setelah Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya pada tanggal 22 Juni 1998 dan kemudian disusul dengan mengadakan konsinyering di Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan Parpol.

Hasil dari Tim inilah yang kemudian berwujud PKB yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di kediaman K.H. Abdurrahman Wahid, Ciganjur Jakarta Selatan. Sesuai harapan warga NU dan bangsa Indonesia, PKB bersama dengan komponen bangsa lainnya diharapkan dapat membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia mencapai cita-cita bangsa.²⁰

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 16.

2. Peranan K.H. Abdurrahman Wahid dalam Membesarkan PKB

Keberadaan PKB sebagai partai baru, diduga oleh banyak pengamat tidak akan memperoleh suara yang signifikan pada pemilu 1999. Kesulitan PKB dalam memperoleh suara, khususnya suara dari massa NU disebabkan karena dalam tubuh NU sendiri, yang dianggap menjadi basis suara PKB, bukan hanya dimiliki oleh PKB sendiri tetapi ada partai lain seperti PNI, PKU, dan SUNI yang juga memiliki tokoh-tokoh yang cukup populer seperti Syukron Makmun dan Yusuf Hasyim. Disamping itu, warga NU terutama dikalangan pesantren, sejak Orde Baru secara politis banyak bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai yang pernah menjadi rumah politik NU. Dan secara ekonomis-politis sudah menjadi bagian dari pendukung Golkar, hal ini membuat semakin tidak mudah untuk mengalihkan suara mereka bagi kemenangan PKB. Atas dasar pertimbangan itu, sekalipun dianggap memiliki basis massa NU tidak berarti PKB akan mendapatkan suara anggota NU secara signifikan.

Akan tetapi, hasil Pemilihan Umum 1999 berbicara lain. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperlihatkan fenomena yang menarik dalam pemilu 1999. Walaupun diperkirakan oleh banyak orang bahwa PKB dengan segala macam persoalan yang sedang dihadapi akan mengalami kegagalan dalam pemilu pertamanya. Namun PKB mampu memperoleh suara yang menakjubkan. PKB menempati urutan ke tiga setelah PDI-P dan Golkar.

Sebagai pemenang dalam pemilu adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 % dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 % sehingga mendapatkan 120 kursi

atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 %, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 %, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997.²¹

Kesuksesan PKB yang saat itu dipimpin oleh Matori Abdul Djali²², dalam memperoleh suara dalam pemilu 1999 tidak terlepas dari peran dan campur tangan Gus Dur, baik itu dari segi personnya maupun dari segi jabatannya sebagai ketua PBNU. Gus Dur sendiri secara formal tidak menjadi pemimpin PKB, namun peran *de facto* Gus Dur sebagai pemimpin spiritual PKB merupakan salah satu faktor yang mendorong keberhasilan PKB. Dari analisis penulis, berikut beberapa peran Gus Dur dalam membesarkan PKB:

a. Pengakuan dan Pemberian Restu oleh PBNU terhadap Berdirinya PKB

PKB adalah satu-satunya partai politik di kalangan warga NU yang mendapatkan pengakuan dan restu dari Ketua Umum PBNU (Gus Dur). Partai-partai lain yang didirikan oleh beberapa tokoh dan warga NU seperti PNU, PKU, dan Partai SUNI tidak diakui secara resmi dan tidak mendapat restu dari PBNU. Dengan mengantongi pengakuan dan restu dari PBNU, maka mayoritas jamaah NU di seluruh tanah air yang berada dibawah kepemimpinan dan komando PBNU akan mudah digerakkan dan dimobilisasi untuk mendukung PKB. Akibatnya, PNU, PKU, dan SUNI menjadi terkucil sehingga tidak mendapatkan dukungan luas dari jamaah

²¹KPU RI, "Pemilu 1999", *Situs Resmi KPU RI*, http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42 (3 Juli 2013).

²²Greg Barton, *op. cit.*, h. 330.

NU. Terbukti dalam pemilu 1999 partai-partai ini hanya memperoleh puluhan atau ratusan ribu suara dan sangat jauh jumlahnya dengan perolehan suara PKB.

b. Sosok Ketokohan Seorang Gus Dur

Sosok Gus Dur yang memiliki reputasi yang baik ternyata mampu menarik simpati mayoritas warga NU dan bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mendukung dan memilih PKB. Sebelum menjadi deklarator PKB, Gus Dur telah dikenal luas oleh masyarakat, baik sebagai sosok intelektual maupun sebagai tokoh nasional. Bahkan, ia juga dikenal di luar negeri dan berpartisipasi dalam berbagai diskusi, seminar, konferensi, dan organisasi internasional. Dengan perangkat ketokohan, intelektualitas, dan reputasi baik semacam ini ia mampu membesarkan nama PKB. Di samping itu, kekuatan tawar menawar politik Gus Dur juga sangat dipertimbangkan dan diperhitungkan.

Secara kekuatan politik, ketokohan Gus Dur mampu dijadikan sebagai alat komunikasi politik PKB dalam memperoleh dukungan di parlemen. Sehingga tidak heran, walaupun bukan sebagai partai pemenang pemilu, PKB mampu menghantarkan Gus Dur ke kursi kekuasaan melalui dukungan dan kekuatan poros tengah.

C. Peranan K.H. Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Presiden RI

1. Perjalanan K.H. Abdurrahman Wahid Menuju kursi kepresidenan.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun

1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal 7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif, saat itu berbagai partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat. Pelaksanaan pemilihan umum ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU terdiri dari wakil-wakil dari pemerintah dan wakil-wakil dari partai-partai politik peserta pemilihan umum. Banyak pengamat menyatakan bahwa pemilihan umum tahun 1999 akan terjadi kerusuhan, namun pada kenyataannya pemilihan umum berjalan dengan lancar dan aman. Setelah penghitungan suara berhasil diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasilnya lima besar partai yang berhasil meraih suara terbanyak di antaranya PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional. Pemilihan umum tahun 1999 hingga saat terakhir pengumuman hasil perolehan suara dari partai-partai politik berjalan dengan aman dan dapat di terima oleh semua partai peserta pemilihan umum.²³

²³Bang Deni, "Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid", *Blog Pribadi Bang Deni*. <http://b4ngd3ni.blogspot.com/2012/11/masa-pemerintahan-presiden-abdurrahman.html> (4 Juli 2013).

Setelah Komisi Pemilihan Umum berhasil menetapkan jumlah anggota DPR dan MPR, maka MPR segera melaksanakan sidang. Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1 – 21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Akhirnya memunculkan tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri berhasil membentuk Kabinet Persatuan Nasional.²⁴

²⁴*Ibid.*

2. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Setelah Gus Dur dan Megawati terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, mereka kemudian membentuk kabinet baru. Kabinet pertama Gus Dur diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik seperti PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Penyeleksiaan nama-nama anggota kabinet yang dilakukan oleh Gus Dur berlangsung selama kurang lebih satu minggu dan pengumuman susunan kabinet yang dibacakan oleh wakil presiden Megawati disiarkan langsung diberbagai siaran televisi. Di samping itu Gus Dur juga mengangkat Bondan Gunawan dan Marsillam Simanjuntak sebagai sekretaris presiden. Gus Dur menempatkan Marsallim sebagai sekretaris kabinet dan Bondan di tugaskan untuk bertanggung jawab penuh terhadap sekretariat baru yang dibangun oleh Gus Dur untuk mengawasi fungsi pemerintahan.²⁵

Reformasi berikutnya yang dilakukan oleh Gus Dur diawal pemerintahannya adalah pembubaran dua departemen. Yang pertama adalah departemen penerangan, dengan alasan, kehadiran departemen ini lebih banyak ruginya dari pada manfaatnya, baik karena pendekatannya yang bersifat stalinis terhadap pengendalian informasi maupun karena kebiasaan yang telah berurat akar untuk memeras uang dari penerbit media. Sementara yang kedua adalah ditutupnya departemen sosial. Hal ini lebih mengejutkan masyarakat saat itu, namun Gus Dur memiliki alasan yang kuat untuk

²⁵Greg Barton, *op. cit.*, h. 383.

menutup departemen ini. Menurutnya, korupsi dan praktik-praktik pemerasan telah sedemikian kuat merasuki departemen ini sehingga lembaga ini tidak dapat lagi direformasi dan kegiatannya harus dilakukan oleh departemen lain. Walaupun banyak pihak yang tidak setuju dengan keputusan ini namun Gus Dur tetap menjalankan keputusannya dan masih banyak juga analis yang menyambut gembira perubahan ini.²⁶

Sebagai presiden RI, Gus tidak hanya disibukkan dengan berbagai persoalan di kabinet dan departemen-departemen namun Gus Dur mempunyai daftar yang luar biasa panjang mengenai apa yang harus dikerjakan dan masalah apa saja yang harus dipecahkannya. Salah satu masalah yang sangat mendesak untuk ditindak lanjuti adalah mengatasi gerakan separatis di Papua Barat dan memutus siklus kekerasan di Aceh.

Dalam menyelesaikan konflik di Aceh, Gus Dur terus mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin masyarakat Aceh untuk menegosiasikan suatu penyelesaian namun sayang sekali usaha ini tidak berjalan mulus. Walaupun Gus Dur menyatakan rasa optimismenya bahwa ia akan bisa menyelesaikan masalah Aceh dengan cepat, namun ia sebenarnya tahu bahwa usahanya memerlukan proses yang panjang dan lama. Prioritas utamanya saat itu adalah mencoba membujuk rakyat Aceh untuk menaruh kepercayaan kepadanya dan memberinya sedikit waktu. Namun rakyat Aceh tetap menuntut diselenggarakannya suatu referendum dan pada akhirnya Gus Dur menyetujui dilaksanakannya suatu referendum. Walaupun perdamaian

²⁶*Ibid.*, h. 382.

saat itu hanya bersifat sementara namun setidaknya Gus Dur telah mampu mencegah terjadinya pertumpahan darah yang lebih banyak.

Secara pribadi Gus Dur menjelaskan bahwa apa yang ada dalam benaknya bukanlah suatu referendum mengenai kemerdekaan melainkan lebih mengarah pada bentuk otonomi daerah. Keputusan Gus Dur tersebut ternyata berhasil menyelamatkan banyak nyawa karena ia berhasil menggagalkan keinginan TNI untuk melancarkan serangan besar-besaran dalam rangka mencapai penyelesaian militer.²⁷

Gus Dur mencapai sukses yang lebih besar dalam pemecahan masalah di Irian Jaya. Pada tanggal 30 Desember Gus Dur berangkat ke Jayapura ibu kota Irian Jaya untuk mengadakan dialog dengan masyarakat di sana dan Gus Dur berhasil menarik simpati para pemimpin masyarakat dan meyakinkan masyarakat agar menghentikan segala tindak kekerasan. Dalam kunjungan ini pula Gus Dur mengganti nama Irian menjadi Papua karena menurutnya arti dari kata Irian yakni telanjang akan menyinggung perasaan bila digunakan untuk menyebut orang yang mendiami provinsi ini.²⁸

Sekembalinya ke Jakarta, Gus Dur mulai berurusan dengan BPPN. Ia mengganti kepala BPPN dengan alasan bahwa ketua lama mempunyai hubungan yang terlalu dekat dengan rezim yang lama. Keputusan ini pun tidak terlepas dari berbagai kritikan dari pihak yang kurang setuju namun Gus Dur dengan sifat keras kepalanya tetap bertahan pada keputusannya.

²⁷*Ibid.*, h. 384.

²⁸*Ibid.*, h. 385.

Pada bulan November 1999, Gus Dur mengunjungi negara-negara Anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Cina (RRC).

Pada bulan Januari tahun 2000, Gus Dur melanjutkan perjalanan ke luar negeri lainnya yakni ke Davos, Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia. Di tengah perjalanan ia memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi Saudi Arabia, dengan harapan dapat mendapatkan bantuan keuangan yang lebih besar bagi kepentingan pemulihan ekonomi Indonesia. Pada bulan Februari Gus Dur berangkat untuk lawatan pentingnya ke negara-negara Eropa. Ia terbang ke London, Paris, Amsterdam, Berlin, dan Roma. Dalam perjalanan pulang ia berkunjung ke New Delhi, Seoul, Bangkok, dan Brunei. Pada bulan Maret Gus Dur melakukan kunjungan sehari ke Timtim tepatnya di kota Dili. Di bulan April Gus Dur mengunjungi Pretoria ibukota dari Afrika Selatan, dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali ke tanah air, Gus Dur singgah di Mexico City dan Hong Kong. Pada bulan Juli Gus Dur kembali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, Prancis, Iran, Pakistan, dan Mesir.²⁹ Kunjungan Gus Dur ke berbagai negara memiliki tujuan yang jelas yakni untuk mendapatkan dukungan dari Eropa dan negara-negara lain, baik secara ekonomi maupun politik untuk pelaksanaan reformasi Indonesia. Akan tetapi banyak pihak yang tidak menyetujui sepak terjang perpolitika Gus Dur ini dan bahkan Gus Dur dianggap hanya membuang-buang uang negara.

²⁹*Ibid.*, h. 387-392.

Disela-sela *tour* Gus Dur ke berbagai negara, Indonesia bukan dalam keadaan tanpa *problem* bahkan boleh dikatakan Indonesia saat itu tidak dalam keadaan stabil. Banyak masalah internal yang menantinya untuk diselesaikan. Pada tahapan ini, tekanan politik terhadap Gus Dur menjadi semakin kuat, hal ini terlihat saat sekertaris presiden, Ratih mengundurkan diri dari jabatannya karena pekerjaan yang dilakukannya penuh dengan tekanan dari berbagai pihak dan lagi ia tidak mendapatkan respon positif dalam setiap usahanya. Nampaknya ada dua kubu yang sangat menentang pemerintahan Gus Dur yakni kubu yang sangat ingin mendesak Gus Dur agar tidak melanjutkan investigasi dan penuntutan terhadap pelaku korupsi sedangkan kubu yang lain berusaha memunculkan keresahan yang cukup besar untuk melemahkan kredibilitas pemerintahan Gus Dur.³⁰ Pada saat yang sama, pertikaian kelompok yang dimulai di Ambon dan Maluku Selatan telah menyebar ke Maluku Utara dan Pulau Halmahera. Hingga akhir Maret, tampaknya situasi di Maluku mulai pulih, tetapi menyebarnya konflik ini menandakan adanya potensi untuk terus berlanjut.

Berbagai tekanan yang dihadapi Gus Dur tidak terlepas dari semua tindakan yang dilakukannya. Lawatan-lawatan yang sering dilakukannya memang sering kali membuat orang tertawa namun hal ini juga sekaligus merupakan salah satu unsur yang membuat kredibilitasnya menurun. Ditambah lagi kebiasaannya untuk mengemukakan apa yang dipikirkannya seakan sekarang menjadi bumerang baginya karena Gus Dur tidak lagi mampu menilai konteks suatu pembicaraan yang melibatkan dirinya karena

³⁰*Ibid.*, h. 395.

ia tidak dapat melihat siapa saja yang ada di ruangan itu dan tidak dapat memantau reaksi terhadap apa yang dilakukannya. Hal ini membuat posisinya semakin tersudut.

Tekanan semakin terasa saat media massa telah menjadi musuh bagi Gus Dur, walaupun sebelumnya Gus Dur memang tidak pernah menjalin komunikasi yang baik dengan media massa. Sehingga hal tersebut digunakan oleh lawan politik Gus Dur untuk melemahkan legalitas Gus Dur atau bahkan mendesak Gus Dur untuk melepaskan posisinya. Salah satu trik yang paling umum adalah mensubversi media massa. Hal ini secara relatif mudah dilakukan karena adanya kebiasaan yang sudah tertanam untuk memberikan amplop berisi uang kepada para jurnalis, mengingat rendahnya gaji para jurnalis sehingga mereka benar-benar membutuhkan tambahan dana untuk kebutuhannya.³¹

Ditengah-tengah tekanan yang bertubi-tubi, Gus Dur mulai melakukan kesalahan dalam penilaian. Pada tanggal 24 April 2000, ia melakukan kesalahan fatal. Di bawah tekanan untuk mereformasi tim ekonominya, ia memecat menteri industri dan perdagangan Jusuf Kalla yang berasal dari partai Golkar dan menteri BUMN, Laksamana Sukardi yang merupakan anak asuh kesayangan Megawati dan seorang tokoh kunci dalam PDI-P dan menggantinya dengan Rozi Munir yang berasal dari PKB. Dalam pertemuan tertutup dengan anggota DPR, Gus Dur mengatakan bahwa pemecatan Laksamana Sukardi ini dilakukan karena menterinya ini tidak mampu bekerja dengan anggota-anggota timnya. Namun sayang sekali,

³¹*Ibid.*, h. 396-397.

laporan media menyebutkan bahwa menurut Gus Dur, Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi ternoda oleh korupsi. Ini hanyalah satu kesalahan namun efeknya sangatlah tidak baik. Keputusan ini membuat hubungan Gus Dur dan Megawati menjadi renggang. Bahkan dikabarkan Megawati sempat terbang ke Singapura untuk menghibur hatinya yang gunda atas persoalan ini.³²

Dampak dari kasus ini bukan hanya sampai di situ, citra PKB sebagai partai yang berkuasa dan NU sebagai penopangnya seakan ikut tercemar atas pergantian Laksamana Sukardi dengan Rozi Munir. Citra Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) telah dilekatkan pada partai ini dan secara tidak langsung hal ini juga berdampak negatif pada Gus Dur.

Beberapa minggu kemudian terkuak skandal lain yang sangat merugikan Gus Dur. Pada bulan Januari, ia meminta Bulog untuk memberikan keterangan mengenai cadangan uang tunai yang ada pada badan ini. Gus Dur sangat ingin mengirimkan uang ke Aceh untuk membantu program kesejahteraan masyarakat agar dapat mendukung tindakannya untuk menegosiasikan perdamaian di provinsi yang kacau ini. Namun Gus Dur tidak dapat memperoleh dana lewat pengeluaran pemerintah yang biasa dan akhirnya Gus Dur mencari jalan untuk meminjam dari cadangan yang disimpan oleh badan-badan pemerintah seperti Bulog. Namun belum sempat ia menjalankan niatnya, pada awal bulan Mei ia mendapat kabar bahwa uang itu telah diambil dengan jumlah empat juta dolar AS oleh Suwondo. Suwondo mendatangi Bulog dan mengatakan bahwa ia adalah utusan khusus dari presiden untuk mengambil uang di Bulog. Namun pada akhirnya

³²*Ibid.*, h. 398.

sebagian besar uang ini dapat diperoleh kembali walaupun Suwondo berhasil melarikan diri. Tidak ada indikasi bahwa terdapat hubungan antara Gus Dur dan Suwondo. Namun demikian, musuh-musuh politik Gus Dur menyatakan bahwa ia terlibat dalam manipulasi uang.³³

Dalam waktu yang hampir bersamaan, ada skandal lain lagi. Ketika Gus Dur sedang kesulitan untuk mendapatkan dana segar untuk keperluan masyarakat Aceh, ia berusaha mencari bantuan kenegara-negara asing untuk melakukan investasi di provinsi ini. Pada akhir Februari Gus Dur berkunjung ke Brunai dan berbicara dengan Sultan Brunai mengenai masalah Aceh. Sultan memberikan sumbangan pribadi sebesar dua juta dolar AS. Namun Gus Dur tidak menyimpannya di rekening resmi pemerintah karena menurutnya ia diminta oleh sultan untuk tidak mengumbar sumbangan tersebut. Walaupun demikian, hal ini tidak sepenuhnya dipercaya oleh para lawan politiknya apalagi Gus Dur pada akhirnya tidak dapat mempertanggung jawabkan dana tersebut.³⁴

Walaupun tidak seorang pun percaya bahwa Gus Dur bersalah melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi, namun tindakan ceroboh dan tidak profesional yang dilakukannya membuatnya terjerumus kedalam lobang yang teramat dalam. Pemecatan Laksamana, empat juta dolar yang diambil dari Bulog oleh Suwondo dan juga kasus Bruneigate sangatlah merusak reputasinya dan bahkan membuat Gus Dur kehilangan dukungan dari banyak pihak.

³³*Ibid.*, h. 400.

³⁴*Ibid.*, h. 401.

Pada bulan April, terjadi lagi kasus lain yang mengusik ketenangan Gus Dur. Serangkaian demostran yang tergabung dalam Laskar Jihad menuntut perdamaian di Ambon dan Maluku dan mempersalahkan pemerintah karena tidak ada upaya pemerintah untuk mencapai perdamaian. Bahkan para demonstran berhasil menerobos masuk ke lingkungan istana kepresidenan dan meminta bertemu dengan presiden. Gus Dur menerima mereka namun kemudian Gus Dur mengusirnya akibat tuduhan yang mereka lontarkan bahwa PDI-P bersekongkol dengan kristen. Keadaan semakin memburuk ketika anggota Laskar Jihad menyatakan bahwa mereka siap berlayar ke Maluku. Gus Dur memberi perintah ke militer untuk memblokir kepergian mereka, awalnya usaha ini berhasil namun pada akhirnya Laskar Jihad dapat juga mendarat di tanah Maluku. Dan setelah beberapa bulan dikabarkan bahwa Laskar Jihad telah mengambil andil dalam konflik di Maluku. Pada tanggal 26 Juni, Gus Dur mengumumkan keadaan darurat sipil di Maluku dan memberikan wewenang kepada penguasa sipil setempat untuk memberlakukan jam malam dan melakukan pemeriksaan senjata. Pemecahan masalah Ambon tidak mudah diselesaikan karena menurut Gus Dur terdapat campur tangan militer seperti Wiranto dan mereka yang bersatu dengan rezim lama. Kekerasan di Maluku yang sebelumnya tampaknya telah mereda kembali meningkat akibat kehadiran Laskar Jihad sejak bulai Mei dan seterusnya.³⁵ Kegagalan Gus Dur untuk menghentikan kekerasan di provinsi ini digunakan sebagai alasan lain untuk menyatakan bahwa ia gagal sebagai presiden.

³⁵*Ibid.*, h. 402-403.

Dari kacamata banyak pihak, Gus Dur bukan hanya gagal dalam mengamankan negara tetapi juga gagal dalam mengelola perekonomian negara dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Gus Dur menerima kritikan tajam tentang kegagalannya memperbaiki ekonomi negara, bahkan dari tim ekonominya sendiri menganggap Gus Dur tidak tertarik sama sekali tentang masalah ekonomi hal ini terlihat karena seringnya Gus Dur tertidur ketika masalah-masalah ekonomi dibicarakan.

Selain itu, masalah pemberantasan korupsi juga dinilai masih lemah. Gus Dur masih ragu untuk menghukum para koruptor. Menurutny ada beberapa alasan mengapa ia tidak bertindak cepat dalam menghukum para koruptor. *Pertama*, belum memadainya sistem hukum di Indonesia untuk pelaksanaan hal tersebut, *kedua*, menurutnya para koruptor memegang kunci bagi pemulihan ekonomi di Indonesia, *ketiga*, Gus Dur berada di bawah tekanan agar ia menghentikan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi yang berkaitan dengan orang-orang yang mempunyai koneksi yang erat dengan rezim yang terdahulu. Ketiga hal ini membuat langkah Gus Dur dalam pemberantasan korup menjadi terhambat dan akhirnya Gus Dur dinilai tidak berhasil dalam memecahkan masalah korupsi.

Akibat dari berbagai persoalan yang tidak kunjung terselesaikan, terutama kasus pemecatan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla, Gus Dur harus berhadapan langsung dengan DPR. Ia diundang untuk menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut. Pada awal Juli, Gus Dur mengumumkan bahwa ia bersedia berbicara di DPR pada tanggal 20 Juli. Sambil menanti hari yang dijanjikan, Gus Dur terus berusaha memperbaiki hubungan dengan

berbagai pihak termasuk Megawati. Namun sayang Megawati tidak memberikan tanggapan apapun. Saat waktu yang dijanjikan telah tiba, Gus Dur berpidato di depan DPR. Namun, hari itu bukanlah hari keberuntungan bagi Gus Dur. Pidato Gus Dur saat itu semakin membuat kemarahan DPR meningkat. Hingga Gus Dur sebagai seorang presiden mengirimkan permintaan maafnya secara tertulis kepada DPR dan dengan 252 tangan mengatakan “kami menerima permohonan maaf presiden tetapi tetap mendesaknya agar ia memberikan penjelasan terbuka mengenai pemecatan dua menteri ekonomi ini.” Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada haru Jumat, 18 Agustus Amin Rais mengetuk meja hijau yang menandakan kebebasan bagi Gus Dur atas semua kasus yang menjeratnya.

Setelah menerima keputusan MPR, Gus Dur merevisi kembali kabinetnya hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja timya dan saat ini ia berkesempatan untuk menyusun kabinet dengan orang-orang pilihannya sendiri. Selain itu, Gus Dur juga berhasil memperbaiki hubungannya dengan Megawati walaupun sangat sulit untuk menyatukan pemikiran mereka. Pada hari Rabu, 23 Agustus, Gus Dur memutuskan untuk mengumumkan susunan kabinetnya yang dibacakan oleh Marsillam.³⁶

Awal berjalannya kabinet baru Gus Dur, semuanya terlihat berjalan dengan lancar namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Berbagai kasus terus saja terjadi dan tanpa ada penyelesaian yang pasti yang pada akhirnya menggoncang kembali kedudukan Gus Dur sebagai presiden.

³⁶*Ibid.*, h. 429.

Sebuah masalah muncul pada awal September 2000, yang mungkin lebih serius dari masalah kerusuhan golongan dan agama yakni pecahnya militer Indonesia. Saat tiga orang pekerja yang membantu PBB berkunjung ke Indonesia dan ditusuk serta dipukuli hingga tewas di kota Atambua, Timur Barat. Atambua terletak didekat perbatasan dengan Timor keadaan ini bertepatan saat Gus Dur berada di New York karena ia telah dijadwalkan untuk berpidato pada pertemuan Puncak Milenium PBB. Gus Dur mengalami penghinaan karena para kepala negara dipertemuan itu menoleh kearahnya ketika Setjen PBB Kofi Annan mengungkapkan bahwa tiga orang pekerjanya terbunuh di Indonesia. Gus Dur yakin waktu pembunuhan itu telah direncanakan dengan baik karena waktu kejadiannya bertepatan ketika Gus Dur berada di New York. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Gus Dur. Sesampainya di Indonesia Gus Dur mengetahui bahwa tersangka utama dari pembunuhan tiga pekerja PBB dilepaskan.³⁷ Dalam kasus ini Gus Dur tidak dapat berbuat banyak karena pada saat yang bersamaan Gus Dur sedang terlibat dalam pertarungan dengan pucuk pemimpin militer mengenai pergantian posisi komando senior.

Dilain sisi usaha perdamaian yang telah diupayakan Gus Dur sebelumnya di Irian Jaya dan Aceh telah menuai reaksi yang negatif. Seperti kritik yang dilontarkan Akbar Tanjung agar pemerintah lebih tegas terhadap kelompok-kelompok yang mencoba mendorong separatisme. Serta mencekal keputusan Gus Dur yang terus membiarkan para pemberontak di Irian Jaya untuk bebas melaksanakan cita-cita separatis mereka serta pengizinan

³⁷*Ibid.*, h. 441-442.

berkibarnya bendera Bintang Kejora. Megawati juga mendukung pendapat Akbar Tanjung. Pernyataan Akbar Tanjung dan Megawati tersebut menimbulkan keraguan mengenai legalitas pengibaran bendera Bintang Kejora sehingga para aktivis Papua Barat kembali menderita perlakuan kasar dari personil keamanan setempat. Serta kehadiran Laskar Jihad di Aceh semakin memperparah keadaan dan akhirnya makin tidak terkendali. Kedua provinsi ini kembali mengalami pertumpahan darah akibat berbagai propokasi dari berbagai pihak. Ditambah lagi banyaknya terjadi pengeboman di berbagai tempat di beberapa provinsi di Indonesia. Semua hal ini membuat posisi Gus Dur semakin sulit jika hal ini terus berlangsung maka ia akan dianggap gagal sebagai presiden pada kesempatan kedua yang diberikan kepadanya.

Banyak pihak menilai bahwa saat itu Gus Dur telah kehilangan kendali dan pengangan atas semua persoalan negara. Tekanan pun akhirnya terus mengalir terhadap Gus Dur yang menginginkan agar dirinya mundur dari kursi kepresidenan.

Pada pertengahan November, penggiat anti Gus Dur di DPR mengonsolidasikan jumlah mereka dalam persiapan untuk melakukan tekanan akhir terhadap presiden yang makin melemah kedudukannya. Menjelang akhir November, rencana untuk menindak lanjuti presiden diajukan ketika 151 anggota DPR menyerahkan dokumen resmi kepada ketua DPR. Dokumen ini merupakan daftar sejumlah alasan yang menurut mereka sudah cukup menjadi alasan untuk mencopot presiden. Alasan-alasan yang mereka sebutkan antara lain: diizinkan bendera Bintang Kejora

dikibarkan di Irian Jaya dan usaha Gus Dur untuk mencabut ketetapan MPR No. XXV tahun 1966 mengenai pelarangan PKI dan doktrin komunisme. Mereka juga mengatakan bahwa presiden belum sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi dan nepotisme, dan berbagai kasus lain selama masa pemerintahan Gus Dur.³⁸ Pemerintahan Gus Dur bagaikan Bom waktu yang siap meledak.

Sepertinya keputusan DPR untuk melengserkan Gus Dur telah bulat. Tanggal 30 April 2001, merupakan tanggal yang ditetapkan oleh DPR untuk pengambilan suara memorandum kedua. DPR memperdebatkan mosi tentang memorandum kedua samapai tengah malam. Dengan demikian, tercapailah kesepakatan untuk mengeluarkan memorandum kedua yang memutuskan akan memberikan teguran kepada presiden. Namun keputusan ini belum bisa membuat legah presiden karena karena masih ada sidang MPR yang harus dilaluinya.

Meskipun demikian, masih ada harapan untuk suatu kompromi. Namun harapan itu hancur lebur oleh pengumuman Amin Rais pada tanggal 20 Mei bahwa MPR akan mempercepat hari dimulainya sidang Istimewa menjadi tanggal 1 Agustus. Seminggu sebelum pengambilan suara ini, Gus Dur yang secara penuh mengetahui tentang gentingnya keadaan, menawarkan untuk memberikan semua kekuasaan eksekutif kepada Megawati dan sebagai imbalannya ia diperkenankan tetap pada jabatannya sebagai kepala negara simbolik.

³⁸*Ibid.*, h. 454.

Akhirnya, pada 20 Juli Amin Rais kembali mempercepat sidang istimewa MPR yang dijadwalkan pada tanggal 23 Juli. Hasil sidang MPR secara resmi memaksulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

3. Peran K.H. Abdurrahman Wahid Saat Menjabat Sebagai Presiden RI

Periode singkat Gus Dur sebagai presiden RI menggambarkan betapa besar tantangan yang dihadapinya saat memangku jabatan sebagai presiden. Persoalan negara yang tindak kunjung selesai serta berbagai keritikan yang tidak ada hentihnya seakan terus mendesaknya untuk melepaskan jabatannya sebagai presiden. Namun dibalik itu Gus Dur tetap dapat menjalankan perannya walaupun selalu mendapat kritikan pedas. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis menemukan ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Gus Dur saat menjabat sebagai presiden yang dampaknya dapat dilihat sampai saat ini, yakni:

a. Pribumisasi

Etnis Tionghoa memang dikenal sebagai kaum minoritas dan sering kali termarginalkan bahkan seringkali mengalami ketertindasan. Awal ketertindasan etnis Tionghoa dimulai sejak Belanda mengeluarkan peraturan pada tahun 1800-an yang berisi larangan kelompok keturunan Tionghoa masuk agama Islam dan larangan bagi kelompok pribumi menikah dengan kelompok Tionghoa. Belanda tampaknya takut melihat Tionghoa dan muslim bersatu. Peraturan ini memiliki dampak pada kehidupan masyarakat Nusantara dalam memandang keturunan Tionghoa. Kelompok Tionghoa menjadi kelompok yang terpinggirkan, dikucilkan

dan dibenci oleh kelompok masyarakat yang lain karena berhubungan dengan mereka berarti malapetaka yang datang dari pemerintahan kolonial Belanda.³⁹

Sejak masa kolonial ketertindasan dan pendiskriminasian terhadap etnis Tionghoa membabi buta di Nusantara. Meskipun sudah merdeka pada masa Orde Lama kebijakan pemerintahan Orde Lama masih tetap mendiskriminasi keturunan Tionghoa, baik politik, budaya, maupun ekonomi. Tekanan terhadap keturunan Tionghoa ini semakin diperparah dengan munculnya peraturan pemerintah Orde Lama (PP. No. 10 tahun 1959) yang melarang keturunan Tionghoa melakukan perdagangan eceran di daerah pedesaan. Pada masa orde baru, pemerintahan Indonesia sedikit berpihak pada keturunan Tionghoa, terutama dalam bidang budaya dan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru lebih memilih merangkul keturunan Tionghoa dalam bidang ekonomi, namun tetap mencurigai mereka dalam bidang politik. Kelompok Tionghoa tidak serta merta mendapat kebebasan karena istilah pribumi dan non pribumi masih tetap diterapkan dalam setiap bidang. Hal ini ditandai dengan kebijakan (Inpres No. 14 tahun 1967) yang melarang semua bentuk ekspresi keagamaan dan adat Tionghoa di muka umum. Sedangkan pada masa Habibie, Habibie mengeluarkan kebijakan (Inpres No. 26 tahun 1998) mencabut istilah pribumi dan non pribumi.⁴⁰ Pada masa ini kelompok keturunan Tionghoa kembali mendapatkan sedikit kebebasan.

³⁹Ibad dan Akhmad Fikri AF, *Bapak Tionghoa Indonesia* (Cet.1; Yogyakarta: LKIS, 2012), h. 62.

⁴⁰*Ibid.*, h. 68-70.

Kita bisa merasakan bagaimana posisi etnis Tionghoa pada saat itu, hidup sebagai kaum minoritas yang mendapat perlakuan ketertindasan dan termarginalkan bukanlah hal yang di inginkan setiap orang. Bahkan peran etnis Tionghoa sebagai warga Negara Indonesia pun banyak dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Ini semua membuat kehidupan mereka sangatlah sulit.

Gus Dur dengan wawasan kebangsaannya memandang bahwa, orang-orang Tionghoa yang ada di Nusantara juga memiliki hak-hak yang sama seperti warga negara yang lain. Karena mereka lahir di negeri ini dan menjadi warga negara, sehingga sepatutnya mereka juga dikenal sebagai penduduk asli seperti yang lainnya. Pembelaan Gus Dur pada kelompok keturunan Tionghoa diwujudkan ketika ia menjadi presiden melalui berbagai kebijakan, seperti PP. No. 6 Tahun 2000 dan diresmikannya Imlek sebagai hari Libur Nasional.

Banyak usaha Gus Dur yang dilakukan untuk membela kaum minoritas, terutama etnis Tionghoa di Indonesia. Seorang tokoh lintas etnis ini memiliki peran yang sangat besar terkait pembelaannya terhadap etnis Tionghoa, sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 kelompok keturunan Tionghoa yang berada di wilayah Semarang, Kelenteng Tay Kek Sie mengangkat dan menobatkan Gus Dur sebagai Bapak Tionghoa Indonesia.

b. Dekonsetrasi TNI dan POLRI

Polri dan TNI sebagai penjaga keamanan negara merupakan sub sistem dari sebuah sistem ketatanegaraan Indonesia, pada awalnya TNI dan POLRI merupakan dua sub yang terpisah yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. TNI yang berfungsi sebagai alat pemerintah dalam hal pertahanan negara sedangkan POLRI merupakan alat pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴¹ Namun semenjak diberlakukannya UU No. 13 1961, pada masa pemerintahan orde baru keduanya di satukan dalam ABRI.

Penyatuan ini hanya bertahan pada resim orde baru. Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan orde baru kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan presiden B.J Habibie terjadi cukup banyak perubahan besar, di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang professional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum.

Sejak 5 Oktober 1998, muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J Habibie melalui instruksi

⁴¹Galun Eka Gemini Pakusadewa, "Akar Permasalahan Konflik TNI-POLRI," *Blog Pribadi Galun Eka Gemini Pakusadewa*. http://kandangelmublogspot.com/2012/10/akar-permasalahan-konflik-tni-polri_25.html (17 Juli 2013).

Presiden No.2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI.

Upacara pemisahan Polri dari ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribata Polri dari kepala staf umum ABRI Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam Letjen TNI Fachrul Razi kemudian diberikan kepada kapolri Jenderal Pol (purn) Roesmanhadi.

Maka sejak tanggal 1 April, Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian, dibawah pemerintahan Gus Dur keluarlah TAP MPR No. VI/2000, kemandirian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju Polisi yang mandiri, bermanfaat dan professional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Akar pemikiran politik K.H. Abdurrahman Wahid sesungguhnya didasarkan pada komitmen kemanusiaan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Gus Dur, komitmen kemanusiaan itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tuntutan persoalan utama dalam kiprah politik umat Islam pada masyarakat modern dan pluralis seperti di Indonesia.
2. Kiprah perpolitikan Gus Dur dimulai saat ia memegang jabatan sebagai ketua umum PBNU, dan makin melebarkan sayapnya dan menunjukkan keseriusannya terlibat dalam perpolitikan Indonesia dengan mendirikan PKB. Dengan popularitas dan kecakapan Gus Dur dalam memainkan peran politik memuat PKB dapat mendulang suara yang mengangkatnya sebagai partai yang diperhitungkan dan bahkan dapat menopang Gus Dur menjadi presiden RI.

B. Implikasi

Perjalanan hidup Gus Dur yang selalu diiringi dengan berbagai pro dan kontra telah diuraikan secara gamblang dalam skripsi ini. Pokok pikiran Gus Dur tentang politik yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat dan tidak mempersoalkan jalan yang dilaluinya merupakan tujuan dari kiprah politiknya, namun sayang jalan yang digunakan Gus Dur, banyak pihak yang tidak

menyetujuinya oleh itu ia banyak mendapat cekalan dari berbagai pihak. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat membuka mata semua pihak atas apa yang telah dilakukan Gus Dur selama hidupnya. Walaupun demikian penulis tidak memungkiri banyak kelemahan dan kecerobohan yang dilakun Gus Dur namun hal itu tidak terlepas dari sifat kemanusiaannya yang tidak luput dari kesalahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik dan Abdurracman Sorjomihardjo. *Ilmu Sejarah dan Historiografi*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Azra, Azyumardi dan Saiful Umam, ed. *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-politik*. Jakarta: PPIM, 1998.
- Barton, Greg. *Gus Dur: the authorized biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur*. Cet. 2; Yogyakarta: KLIS, 2012.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Cet. 1; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Esposito, John L. dan John O. Voll. *Makers Of Contemporary Islam*. Terj. Sugeng Hariyanto, Sukono dan Umi Rohimah, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim. *Pedoman Penulisan karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cet. 2; Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Ibad dan Ahkmad Fikri AF. *Bapak Tionghoa Indonesia*. Cet. 1; Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Koirudin. *Menuju Partai Advokasi*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2005.
- Kholisoh, Nur. *Demokrasi Aja Kok Repot: Retorika Politik Gus Dur dalam Proses Demokrasi di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012.
- Madjid, M. Saleh dan Abd. Rahman Hamid. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet. I; Makassar: Rayhan Intermedia, 2008.
- Mansykur Musa, Ali, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ma'shum, Saifullah, ed. *Karisma Ulama: kehidupan ringkas 26 tokoh NU*. Cet. 1; Bandung: Mizan, 1998.

- Moh. Ali. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Musa, Ali Masykur. *Pemikiran dan sikap politik Gus Dur*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mufid AR, Achmad. *Ada Apa Dengan Gus Dur*. Cet. 1; Yogyakarta: KUTUB, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Cet. 10; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Suaedy, Ahmad dan Ulil Abshar Abdalla, ed., *Gila Gus Dur: wacana pembaca abdurrahman Wahid*. Cet. 2; Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Surahmad, Winarto. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: Tarsito, 1987.
- Supriyadi, "Peran Politik Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa" Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Cet. 2; Yogyakarta: LKiS, 2010.



RIWAYAT HIDUP

Nurhidayah, lahir di Wajo, 24 Agustus 1990. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Drs. H. A. Abd. Mannan. H. dan Hj. Maryam S.Pd.I.

Penulis mulai memasuki dunia pendidikan tingkat dasar tahun 1998 di SD Negeri 29 Panaikang Kab. Maros dari kelas I-V kemudian pindah ke SD Negeri 22 Belopa. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah di SLTP Negeri 1 Belopa tahun 2001-2004. Pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Belopa sampai tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007-2011 melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di UIN Alauddin Makassar prodi PGMI.

Pada tahun 2009 penulis kembali mendaftar di UIN Alauddin Makassar jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora dan menyelesaikan pendidikan pada tanggal 26 Agustus 2013.

